

ANALISA

1983—10

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
Pande Radja SILALAH
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
A. Sudiharto DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Kirdi DIPOYUDO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

ANALISA

TAHUN XII, NO. 10, OKTOBER 1983

PENGANTAR REDAKSI	848
SUATU PEMIKIRAN FILOSOFIS MENGENAI MANUSIA	851
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SEBAGAI DASAR NEGARA <i>BABARI</i>	860
HUMANISME: ARTI DAN POKOK-POKOK PIKIRANNYA <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	871
HAK-HAK ASASI MANUSIA: HAKIKAT DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA <i>Sunarto NDARU MURSITO</i>	883
KEBIJAKAN INTERNASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA <i>Bantarto BANDORO</i>	897
DEMOKRASI SEBAGAI CARA HIDUP <i>William EBENSTEIN</i> (disadur oleh Kirdi DIPOYUDO)	906

Pengantar Redaksi

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia menempatkan "manusia" secara istimewa dalam kehidupan berne-gara dan bermasyarakat. Manusia diakui sebagai makhluk berakal budi yang multi-dimensi, yakni sebagai pribadi dan makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sebagai makhluk sosial dalam Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipin-pin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berarti bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi, dan bahwa manusia harus diperlakukan sama, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit karena terdapat persamaan derajat dan hak serta kewajiban asasi antara semua orang.

Pengakuan dan perlakuan seperti ini adalah wajib karena manusia me-rupakan pribadi atau individu dengan kodrat rasional yang mandiri atau otonom dan pada hakikatnya perlu mewujudkan diri agar menjadi sempurna dengan menggunakan akal budi dan kemauan bebasnya. Manusia adalah suatu kemungkinan untuk pengutuhan yang lebih tinggi sehingga pengutuhan semacam itu menjadi tugas dan panggilannya. Mengingat kemandirian khas-nya manusia harus melakukan tugas dan panggilannya itu dengan caranya sen-diri. Kodrat rasional manusia inilah yang membedakannya dari binatang atau benda-benda alam lainnya. Memang manusia memiliki badan sebagai bagian dari alam semesta, tetapi badan ini dipersatukan dengan jiwa rohani yang melampaui alam. Dengan kata lain manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang erat sekali sehingga disebut jiwa rohani yang menjelma dalam badan atau badan yang berjiwa-rohani.

Oleh sebab itu dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini tersirat bahwa manusia menduduki tempat yang "sentral" dalam negara dan pembangunan, bukan saja sebagai "pelaku," melainkan juga sebagai "tujuan." Manusia memang wajib ikut dalam pembangunan dan dalam rangka itu memerlukan otak dan mencurahkan tenaganya, tetapi dia tidak boleh diperlakukan sebagai alat belaka atau semata-mata sebagai faktor produksi. Pendeknya pembangunan bertujuan untuk mempermudah atau memungkinkan orang-orang Indonesia hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya dengan baik.

Karena membutuhkannya, manusia harus bersama-sama membentuk negara dan hidup sebagai warganya. Sila Persatuan Indonesia mewajibkan manusia Indonesia untuk mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Berdasarkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, rakyat Indonesia wajib memperjuangkan kepentingan bersama ini berdasarkan persamaan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu orang tidak diperbolehkan memaksakan pendapat atau kemauannya kepada orang lain. Sebelum keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diambil, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah untuk mufakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia lebih mempertegas dimensi sosial manusia. Dalam usaha negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, manusia Indonesia berhak dan berkewajiban untuk ikut serta secara aktif dan berhak mendapatkan bagian wajar dari hasilnya. Oleh sebab itu pembangunan nasional tidak hanya dibatasi sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, tetapi juga sebagai pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sila terakhir ini menuntut agar dikembangkan sikap adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab untuk kesejahteraan lahir batin yang merata.

ANALISA Oktober 1983 menurunkan enam buah karangan sebagai sumbangan pemikiran untuk memahami Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam rangka pelaksanaannya demi mewujudkan tujuan-tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Karangan yang pertama merupakan hasil studi suatu kelompok kerja CSIS mengenai pemikiran filosofis mengenai manusia. Karangan yang kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Dasar Negara" yang ditulis oleh BABARI mencoba menganalisa penguasaan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam UUD 1945 serta arti kemanusiaan dalam pembangunan. Dalam karangan yang ketiga, Kirdi

DIPOYUDO membahas arti humanisme, pandangan-pandangan pokoknya dan perjuangan humanisme. Sunarto NDARU MURSITO dalam karangan yang berikut membahas hakikat dan sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia. Dalam karangan yang kelima, Bantarto BANDORO menyoroti kebijakan internasional hak-hak asasi manusia. Karangan yang terakhir "Demokrasi sebagai Cara Hidup" yang diambil Kirdi DIPOYUDO dari William EBENSTEIN, "Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism," merupakan pembahasan teoretis mengenai ciri-ciri pokok cara hidup demokratis yang berkisar pada manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial yang pada hakikatnya sama dengan sesamanya.

Oktober 1983

REDAKSI

Suatu Pemikiran Filosofis Mengenai Manusia*

Untuk memahami sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka pelaksanaannya oleh perorangan maupun negara, kiranya bermanfaat untuk membahas secara filosofis apakah manusia itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab tak lain ialah sikap yang harus diambil terhadap manusia: manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Pertanyaan mengapa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab dapat dijawab dengan mengatakan bahwa "Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya."¹ Dengan perkataan lain, manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab karena harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa menuntutnya. Selanjutnya harkat dan martabat manusia itu bersumber pada hakikat (nature) manusia sebagai manusia yang membedakannya dengan segala sesuatu lainnya dalam alam semesta.

Tulisan ini dimaksud sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk memahami hakikat manusia sebagai manusia itu. Dalam bagian yang pertama mengenai manusia sebagai totalitas, akan dibahas secara berturut-turut manusia sebagai kesatuan jiwa dan badan, manusia sebagai subyek, manusia sebagai pribadi sosial dan manusia sebagai ciptaan Tuhan, sedangkan dalam bagian yang kedua mengenai manusia sebagai dinamika akan dibicarakan manusia sebagai suatu panggilan, cita-cita manusia paripurna dan kebudayaan serta karyanya.

* Diambil dari suatu analisa yang dibuat oleh suatu kelompok kerja CSIS.

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

MANUSIA SEBAGAI TOTALITAS

Manusia sebagai Kesatuan Jiwa-Badan

Berbicara mengenai manusia dapat dimulai dari pelbagai sudut. Orang dapat menguraikannya sesuai dengan pandangan hidupnya; sesuai dengan nilai-nilai apa yang dianggapnya sangat menentukan martabat manusia.

Salah satu ciri dari manusia ialah kesatuannya dengan dunia luar, atau dengan istilah filosofis "in-der-Welt-sein" (istilah Heidegger). Manusia tidak mungkin berada tanpa implikasi dengan dunia. Ia hidup dan bertindak selalu dalam hubungannya dengan dunia. Manusia tak dapat dipikirkan tanpa dunia. Dunia di sini bukan dalam arti lokal, melainkan merupakan dimensi dalam diri manusia. Manusia dan dunia merupakan kesatuan struktural.

Kesatuan kosmologis yang terwujud dalam strukturasi manusia-dunia, secara intim terwujud juga dalam diri pribadi manusia. Manusia merupakan satu kesatuan atau lebih tepat satu kesatuan jiwa-badan. Dengan lain kata suatu *totalitas*. Yaitu kesadaran akan adanya 2 momen dalam dirinya sebagai jiwa dan badan, yang kedua-duanya harus selalu menjadi kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Justru kesadaran inilah yang membuat manusia dapat mengadakan refleksi atas diri sendiri bahwa ia sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup dan berkembang dengan semestinya jika ia lebih mementingkan salah satu momen tersebut; ia akan menjadi manusia yang timpang, manusia pincang. Jika manusia hanya hendak memperkembangkan momen badan, maka manusia menjadi orang yang hanya berbentuk tubuh bagus, tetapi seakan-akan ia tak mempunyai isi, seakan-akan merupakan suatu kekosongan. Sebaliknya orang yang hanya mementingkan momen rohani atau kejiwaan belaka akan terjatuh dalam suatu eksekse lain ialah kejiwaan yang tak dapat dihayati lagi, suatu abstraksi yang tak lain dan tak bukan ialah mematikan manusia itu sendiri, mengeringkan manusia seutuhnya. Maka dari itu pandangan yang tepat ialah yang selalu memandang manusia sebagai suatu keutuhan. Momen jiwa dan badan selalu diperkembangkan bersama.

Sebagai bukti dari totalitas atau keseutuhan tersebut dapat ditunjuk adanya pengaruh timbal-balik antara jiwa dan badan. Badan tidak berdiri sendiri, melainkan hanya ada dalam kesatuan dengan jiwa. Maka dari itu tampak pula pengaruh yang jelas dari badan terhadap jiwa. (Ingat jika seseorang sedang sakit, walau hanya kepala yang pening, tetapi seluruh manusia, seluruh "aku"-nya sakit). Di lain pihak pengaruh jiwa atas badan pun cukup jelas tampak dari pengalaman sehari-hari, yang dengan gamblang dapat menunjukkan kesatuan 2 momen yang merupakan keseluruhan manusia. (Misalnya orang yang bercinta, sesuatu yang rohani, haruslah di-"badan"-kan, di-ejawantahkan dalam kata-kata, syair, nyanyian atau tindakan sesuatu yang

mengekspresikan cinta tersebut). Ini menunjukkan aspek lain dari kesatuan jiwa-badan, yaitu pengaruh badan atas jiwa, atau lebih tepat lagi sumbangan positif dari badan bagi perkembangan jiwa, demi keutuhan manusia. Maka dari uraian di atas jelaslah kiranya arti totalitas atau kesatuan 2 momen jiwa-badan yang hanya dalam kesatuan itulah boleh disebut manusia.

Manusia sebagai Subyek

Manusia tidak hanya mengakui dan menghayati bahwa ia merupakan suatu kesatuan, tetapi juga mengalami dan meyakini bahwa ia adalah suatu individu. Dalam kesadarannya ia dapat membedakan diri dengan alam sekitarnya, yang terbuka baginya dan tersedia baginya untuk diolah dan dikerjakan demi kepentingannya; sedang dirinya disadari berfungsi sebagai tujuan. Dengan lain kata, ia sadar akan dirinya sebagai *subyek* yang dihadapkan pada dunia luar sebagai *obyek*.

Sebagai subyek ia memiliki kediripribadian yang mengatasi atau men-"transendir" dunia luar, alam sekitar. Seekor hewan ditentukan oleh nalurinya dan tak dapat berbuat lain daripada apa yang telah ditentukan oleh kodratnya. Akan tetapi seseorang manusia, yang merupakan subyek "mandireng pribadi," bermartabat pribadi (*persona*), ia dapat mengatasi alam sekitar, dan tak dideterminasikan oleh naluri. Ciri khas dari manusia ialah justru dapat mengatakan "Tidak" kepada tuntutan naluri atau alam sekitar demi perkembangan pribadi. Dan kemampuan untuk mengatakan "Tidak" ini adalah berkat martabat manusia sebagai pribadi.

Sebagai pribadi atau subyek ia menyadari akan adanya dunia luar sebagai obyek, sebagai alat untuk memperkembangkan diri manusia sebagai tujuan proses perkembangan tersebut. Maka ciri khas ada manusia itu ialah "eksistens" (dari "ex" = ke luar dari diri sendiri; dan "sistere" = berdiri sendiri) artinya: ke luar dari diri sendiri, terbuka terhadap dunia luar. Dan keterbukaan ini tak hanya dalam mengenal dan mengetahui dunia, melainkan lebih-lebih justru dalam mengolahnya secara aktif dan kreatif. Jadi ada sebagai manusia itu ada yang aktif dan kreatif.

Manusia sebagai Pribadi Sosial

Dalam refleksi tentang diri pribadinya, manusia tidak hanya sadar akan adanya dunia luar sebagai obyek, melainkan ia juga menyadari adanya sesuatu yang "bukan aku," tetapi ternyata semartabat dengan "aku." Inilah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tepat *sesama*. (Ingat contoh bercakap-cakap, berkomunikasi, saling mengeluarkan dan menangkap pi-

kiran satu sama lain). Kita bertemu dengan manusia lain dalam taraf yang sama, kita berada dalam "kondisi manusiawi" (condition humaine). Maka kesadaran tersebut meyakinkan kita bahwa realita-bukan-aku yang kita hadapi tersebut adalah "alter ego." Dan hubungan antara aku dan sesama-ku atau "alter ego" itu adalah hubungan subyektif, artinya terlaksana dalam taraf *antar-subyek*, dalam saling harga-menghargai dan saling menghormati, yang secara singkat diistilahkan hubungan "*inter-subyektif*." Kesatuan dari semua sesama kita dalam suatu waktu dan tempat tertentu disebut *masyarakat*. Manusia dan masyarakatnya bukan merupakan 2 realita yang asing satu sama lain, yang saling mempengaruhi dari luar, melainkan membentuk horison dinamis dalam hubungannya yang dialektis. Keduanya merupakan lapangan bekerja sama dengan suatu dorongan dialektis, saling memajukan dan saling memperkembangkan. Sebab itu kemajuan manusia bukannya hasil seseorang atau suatu individu, melainkan adalah hasil kerja sama manusia. Maka manusia dan masyarakatnya merupakan 2 momen dari satu realita hidup manusia, sebab kedua momen tersebut saling melengkapi atau komplementer. Inilah salah satu dimensi fundamental dari kehidupan manusia, yaitu bahwa manusia itu adalah makhluk *sosial*. Struktur manusia adalah "bersama orang lain." Sosial berarti bahwa manusia itu dalam segala tindakannya selalu membutuhkan sesama. Kerja manusia adalah selalu kompleks dan hanya dapat dilaksanakan bersama sesama. Hasil pengolahan dunia oleh manusia yang lazim disebut kebudayaan itu bukan hasil individual seseorang, melainkan hasil kerja bersama antara sesama. Hasil dari kerja sama yang berdasarkan resiprosita atau daya kreatif yang timbal-balik antara manusia dan sesamanya. Memang telah menjadi kodratnya dan menjadi struktur manusia untuk bekerja sama dengan sesamanya. Manusia pada dasarnya tak hanya "koeksistensi," melainkan juga "kooperansi." Koeksistensi dan kooperasi adalah 2 unsur yang esensial dalam hidup manusia.

Sesuatu segi yang perlu disoroti tersendiri sehubungan dengan pendidikan ialah *keluarga*. Keluarga adalah kesatuan (unit) terkecil dalam masyarakat yang menjadi unsur esensial bagi pembentukan warga masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keluarga inilah yang menjadi inti pendukung masyarakat dalam mengejar cita-cita bersama, kesejahteraan bersama. Dukungan ini di dalam keluarga lebih-lebih terjadi dengan karya pembentukan warganya menjadi pribadi paripurna. Maka dalam proses mencapai kesejahteraan bersama ini keluarga menempati kedudukan penting sebagai institusi yang mengarahkan dan membentuk warga-warganya ke berhasilnya dan terlaksananya kesejahteraan bersama itu, melalui kesejahteraan keluarga. Dan perlu dinyatakan di sini bahwa kesejahteraan keluarga yang sesungguhnya tidak pernah dapat bertentangan dengan kesejahteraan bersama dari masyarakat seluruhnya, sebab selalu saling memperkembangkan dan saling berhubungan secara dialektis.

Manusia sebagai Ciptaan

Dalam tinjauan di atas barulah dikemukakan hubungan-hubungan manusia dengan dunia, manusia dengan sesama, pendek kata hubungan horisontal manusia. Akan tetapi kecuali dimensi horisontal tersebut, manusia memiliki *dimensi vertikal* pula. Manusia secara *ontologis* terbatas kemampuannya. Ini tidak berarti bahwa kemajuan yang telah kita capai, misalnya di bidang teknik, berhenti pada titik yang telah tercapai ini, melainkan dalam arti bahwa betapapun besar kemampuan manusia itu, suatu saat dalam suatu titik tertentu akan berhenti. Ada batas. Ada limit. Kalau batas atau limit ini telah dilampaui dengan suatu kemajuan atau penemuan baru, manusia akan menemukan batas ataupun limit berikutnya. Demikian seterusnya. Hingga tepatlah kalau dikatakan bahwa manusia itu serba *faktual*. Manusia selalu dihadapkan pada fakta. Ia selalu menghadapi fakta ini atau itu. Ia tak pernah dapat menimba habis adanya; dengan lain kata adanya tak mungkin dapat *ekshaustif*, tetapi selalu faktual. Ia tak pernah dalam eksistensi yang total, tetapi selalu dalam bentuk eksistensi yang tertentu dan terbatas. Maka ada manusia itu seolah-olah "dicampakkan" di dunia, "Geworfensein." Inilah yang membuat manusia selalu waswas dan gelisah akan masa depan, akan adanya yang mendatang. Siapakah atau apakah yang menjamin kelangsungan adanya? Apa atau siapakah yang menanggung bahwa sesaat kemudian ataupun beberapa saat kemudian adanya akan dilangsungkan? Kegelisahan atau ketidaktenangan akan eksistensi yang mendatang ini barulah dapat dihilangkan atau waswas tersebut baru dapat ditenangkan jika manusia menerima bahwa ada realita yang menjadi dasar dari segala realita yang ada, sumber dari segala eksistensi dan tujuan dari segala yang ada, ialah yang disebut *Yang Maha Ada*. Inilah dasar eksistensi, inilah *raison d'être* dari segala yang ada. Dan bagi orang-orang yang beriman, Yang Maha Ada itu disebut Tuhan Yang Maha Esa. Suatu perkembangan ataupun arah perkembangan yang hanya mementingkan segi ekonomi atau segi sosial (dimensi horisontal), adalah suatu perkembangan yang berat sebelah, suatu perkembangan yang pincang. Dan suatu perkembangan yang pincang selalu tidak menguntungkan kemajuan ke arah tercapainya kesejahteraan bersama. Jadi secara umum telah dapat dikemukakan bahwa arah perkembangan manusia tidaklah cukup utuh dan menyeluruh, kurang integral, jika dimensi vertikal ini dilalaikan.

MANUSIA SEBAGAI DINAMIKA

Manusia adalah Suatu Panggilan

Dari bagian pertama di atas jelas kiranya bahwa manusia itu merupakan totalitas, merupakan keutuhan baik dalam diri sendiri maupun dalam hu-

bungannya dengan sesama sebagai makhluk sosial. Akan tetapi haruslah cepat-cepat ditambahkan bahwa totalitas tersebut bukanlah suatu totalitas statis, suatu totalitas yang telah selesai dan tak akan berkembang lagi, melainkan justru suatu totalitas dinamis; merupakan sumber kegairahan berkembang dan memang harus diperkembangkan. Sebab manusia dalam dirinya mengandung dinamika, atau lebih tepat dikatakan: manusia itu adalah dinamika yang harus digerakkan, suatu potensialita yang harus diaktualisasikan. Dengan kata-kata sederhana: manusia adalah suatu bakat yang harus dikembangkan, suatu tugas yang harus diselesaikan; pendek kata manusia itu sendiri merupakan *panggilan* yang harus ditanggapi. Tepatlah kalau dikatakan bahwa manusia itu selalu merupakan manusia yang belum selesai, senantiasa masih harus diselesaikan, diperkembangkan menuju keparipurnaan. Manusia itu selalu "memanggil" untuk disempurnakan. Dan memperkembangkan serta menyempurnakan manusia itu adalah realisasi diri. Manusia dipanggil merealisasikan diri secara paripurna baik rohani maupun jasmani. Dengan demikian manusia merealisasikan cita-cita. Atau jika dibalik: dengan merealisasikan diri itu manusia melaksanakan cita-cita manusia paripurna. Cita-cita manusia yang dilaksanakan dalam realisasi diri ini membutuhkan orientasi luas yang memungkinkan pelaksanaan cita-cita tersebut. Maka perlulah terlebih dahulu kita membahas cita-cita manusia paripurna.

Cita-cita Manusia Paripurna

Dalam merealisasikan diri manusia seutuhnya perlulah memperhatikan hakikat manusia yang harus diperkembangkan itu.

Di atas telah dibentangkan bahwa manusia itu merupakan totalitas. Maka dalam membahas cita-cita manusia paripurna ini sangatlah konsekuensi kalau dikemukakan bahwa cita-cita manusia paripurna itu haruslah *integral*, menyeluruh; seluruh totalitas yang disebut manusia itu harus diperkembangkan sepenuhnya. Maka cita-cita manusia paripurna adalah manusia yang terbentuk secara integral; baik dalam dimensi horisontal maupun dalam dimensi vertikal. Hal ini secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dimensi Horisontal

- a. Manusia dengan *dunia luar*: manusia paripurna senantiasa memperkembangkan diri sebagai *subyek* (pribadi) dengan mempergunakan dunia luar (obyek) sebagai alat. Manusia paripurna tidak "diperalat" oleh obyek, tetapi malah senantiasa mengatasi (menransendir) obyek. (Misal: ia tak pernah diperalat oleh uang, melainkan selalu mempergunakan uang sebagai alat, sebagai obyek demi perkembangan pribadinya sebagai subyek dan tujuan).

- b. Manusia dengan *sesama*: manusia yang berperilaku kemanusiaan; artinya manusia yang mengakui dan berusaha menghayati asas *inter-subyektivitas*: menganggap dan memperlakukan sesama manusia sebagai sesama subyek, semartabat sebagai pribadi. Hal ini secara minimal berlandaskan atas keadilan; sedang secara optimal berlandaskan cinta kasih. Cinta kasih sejati adalah suatu sikap atau keinginan untuk memperkembangkan orang lain sebagai pribadi.¹

Dimensi sosial dari manusia ini merupakan dimensi yang fundamental serta hakiki dalam diri manusia, dan tidak hanya berlaku antara individu dengan individu, melainkan berlaku pula antara bangsa dan bangsa (kelompok individu-individu); hal ini disebut asas "internasionalisme."

Di dalam merealisasikan diri manusia senantiasa terbatas dalam ruang dan waktu tertentu, maka dari itu sudah sepantasnya mempunyai relasi khas dengan daerah dan jaman di mana ia hidup. Hal ini secara konkrit dinyatakan dalam sikapnya yang mencintai tanah air dan bangsanya, atau asas "nasionalisme."

Di dalam memasyarakat mencapai tujuan kesejahteraan bersama maka kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara, dan hubungan warga negara dengan negara serta sebaliknya; hal mana disebut asas "demokrasi."

Dan manusia yang dalam merealisasikan diri senantiasa menjunjung tinggi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil pembudayaannya, itulah manusia yang berusaha melaksanakan asas "keadilan sosial."

Dimensi Vertikal

Cita-cita manusia paripurna senantiasa mencakup perkembangan relasi vertikal dengan dasar eksistensinya, dengan Yang Maha Ada. Inilah aspek *religius* dalam realisasi diri manusia. Maka secara singkat cita-cita manusia paripurna itu dapat dirumuskan sebagai cita-cita manusia Pancasila. Manusia yang secara utuh dan penuh (paripurna) telah diperkembangkan sesuai dengan norma-norma yang termaktub di dalam Pancasila.

Kebudayaan dan Karya

Di dalam merealisasikan diri, manusia sudah sewajarnya memperkembangkan diri dengan sikap yang terbuka dan mengadakan kontak dengan dunia. Sikap terbuka ini menunjukkan bahwa sebetulnya manusia sejak se-

¹Lihat M. Nedoncelle, *Vers une philosophie de l'amour* (Paris, 1946), hal. 11.

mula adalah suatu bakat (potensialita) yang harus diisi, direalisasi dengan dinamiknya. Berada di dunia berarti lebih-lebih *aktif* di dunia. Dunia yang dihadapi manusia bukanlah dunia yang sudah sempurna dan selesai, tetapi dunia mentah yang perlu dikerjakan, diolah dan dibuat supaya menjadi "leefbaar." Dan pengolahan dunia mentah ini dilangsungkan dengan tenaga manusia. Jadi manusia itu harus *bekerja*. Berada sebagai manusia berarti hidup aktif, dan berada -- untuk -- bekerja. Sikap ini boleh disebut *makarya*, yang tidak hanya mencakup karya intelektual, melainkan juga merangkum kerja dengan tenaga fisik. Makarya adalah *pencerminan diri pribadi manusia* ke luar, makarya adalah proses produksi dari dan oleh manusia; makarya adalah suatu selfproducing process yang terjadi atas rangsangan dunia sebagai tantangannya. Maka dari itu makarya mempunyai nilai fundamental dalam hidup manusia. Berkat struktur manusia di dunia secara aktif dan yang direalisasi oleh aktivitas makarya sebagai ekspresi hakiki diri pribadi manusia itu, maka manusia memanusiakan dunia, menghumanisasi dunia, artinya membuat dunia menjadi human dan leefbaar. Dan sebaliknya dengan aktivitas humanisasi dunia itu dengan sendirinya manusia menghumanisasi dirinya sendiri, menyempurnakan diri pribadi, merealisasikan dirinya. Proses realisasi diri manusia dan dunia itu adalah gejala kemajuan dalam sejarah manusia. Menjalankan kesatuan struktural antara diri pribadi dengan alam jasmani itu kita sebut *membudaya*. Dan dunia yang kita kerjakan, kita olah dan kita angkat menjadi kesatuan harmonis dengan diri kita itu, kita sebut *kebudayaan*. Dalam pengertian filosofis, kebudayaan dan hasil kebudayaan tidak terbatas pada kesenian dalam arti sempit seperti seni pahat, seni suara, seni tari, dan lain-lain, tetapi juga meliputi segala hasil perkembangan manusia yang dicerminkan dalam teknik, ekonomi, hidup sosial, politik dan sebagainya, termasuk juga pendidikan!

Dalam kebudayaan sebagai hasil perkembangan manusia itu terdapat dua aspek yang korelatif dan saling mengisi. Aspek *subyektif*: yaitu kebudayaan yang immanent dalam subyek hasil realisasi potensi yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan ilmiah, pembentukan moral, manusia yang religius. Kemudian aspek *obyektif*: yaitu hasil karya manusia dalam rupa benda obyektif, seperti hasil teknik, barang kesenian, bahasa dan lain-lain, demikian pula sistem pendidikan. Di antara kedua aspek kultural ini selalu terjadi pengaruh timbal-balik. Manusia membutuhkan alam untuk bisa melangsungkan dan memperkembangkan diri. Setiap manusia dilahirkan, dibentuk dan dibesarkan dalam kebudayaan yang tertentu. Sebab itu kebudayaan pada umumnya mempunyai pengaruh besar sekali terhadap perkembangan hidup manusia. Tetapi kalau manusia yang dibesarkan dalam kultur/kebudayaan tertentu itu telah mencapai taraf kedewasaannya, maka ia secara aktif dapat memperkembangkan apa yang diterimanya dalam masyarakat itu, dan dengan demikian ia memperkaya dan mempertinggi hasil kebudayaannya. Dengan demi-

kian kultur obyektif di satu pihak merupakan bahan yang dibutuhkan manusia untuk hidup, tetapi di lain pihak manusia bertindak kreatif juga terhadap kultur yang telah dicapai. Pengaruh timbal-balik (resiprositas) sepanjang waktu antara kultur subyektif dan obyektif membuat kebudayaan sebagai suatu realita *historis*, artinya realita yang menyejarah dalam suatu waktu tertentu.¹

Tak perlu dijelaskan di sini bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk kebudayaan. Bahkan pendidikan mempunyai peranan dan kedudukan yang hakiki dalam kebudayaan.

¹Lihat L. Janssens, *Personalisme en demokratisering* (Brussel, 1965), hal. 44.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sebagai Dasar Negara

BABARI*

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan: "... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹ Susunan seperti ini menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dan tiap sila mengandung keempat sila lainnya atau dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.² Misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini berarti bahwa negara yang berdiri di atas landasan Pancasila menjunjung tinggi

*Staf CSIS.

¹Lihat UUD 1945.

²Prof.Drs. Notonagoro SH, *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila* (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1970), hal. 31-32.

martabat dan hak-hak asasi manusia dan menekankan pentingnya persamaan hakiki semua orang. Pada gilirannya Pembukaan UUD 1945 merupakan penuanan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun, sebab mengubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara Republik Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang kemudian disahkan oleh MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966. Ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diganti oleh dasar-dasar yang lain.

BEBERAPA POKOK PIKIRAN

Apabila sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila diuraikan secara analitis, maka ditemukan beberapa pokok pikiran, yaitu kemanusiaan, adil, beradab dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai kesatuan (sila) dalam Pancasila.

Kemanusiaan menempatkan setiap manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diakui sebagai pribadi mandiri yang mempunyai budi dan kehendak sendiri. Oleh karena itu semua manusia pada hakikatnya sama. Dalam kesamaannya ini setiap orang sebagai manusia memiliki hak-hak asasi; sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama; dan sebagai orang yang berpandangan hidup Pancasila menolak liberalisme dan totaliterisme. Kemanusiaan mendorong kita masing-masing untuk secara bijaksana menemukan jalan tengah antara hidup perorangan dan hidup kemasyarakatan. Setiap manusia harus mampu mengembangkan bakat-bakat sosial dan perorangannya secara seimbang. Dalam Pancasila kesadaran individu berdam-pingan dan selaras dengan kesadaran sosial.¹ Negara Pancasila menjamin derajat kemanusiaan dalam segala lapangan kehidupan dan memberikan kesempatan yang sama kepada para warganya untuk berkembang menjadi pribadi manusia yang utuh, bebas dari ikatan yang merendahkan dan merdeka berusaha untuk mencapai derajat dan nilai kemanusiaan yang dicita-citakan-nya. Pancasila memberi kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk mengembangkan dirinya sebagai putra bangsa, warga negara dan anggota masyarakat seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain berdasar atas kesadaran bahwa manusia adalah sederajat.²

¹Rahmat Subagio, *Pancasila sebagai Dasar Negara* (Yogyakarta: Basis, 1955), hal. 67-75.

²Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dalam Kirdi Dipoyudo, *Pancasila Arti dan Pelaksanaannya* (Jakarta, CSIS, 1979), hal. 94.

Adil merupakan kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing orang haknya atau bagiannya,¹ sedangkan tujuannya adalah agar setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan tugas eksistensinya. Keadilan mewajibkan manusia atau negara untuk memberikan kepada masing-masing orang haknya atau membiarkan apa yang menjadi haknya. Untuk itu diperlukan hukum yang mengatur agar hak-hak per-orangan tidak dilanggar. Tugas negara adalah menjamin agar hak-hak semua orang dihormati.² Sebagai ilustrasi tentang orang adil, kita dapat mengutip pendapat Philemon sebagai berikut: "Seseorang yang merupakan orang adil bukanlah orang yang *tidak melakukan* kesalahan, melainkan seseorang yang walaupun *boleh* melakukan kesalahan tidak mau berbuat demikian; bukanlah seseorang yang menahan diri dari mengambil benda-benda sepele, melainkan seseorang yang kuat menolak untuk mengambil benda-benda berharga, meskipun ia dapat mengambil dan memilikinya tanpa risiko kerugian; tidak, bahkan bukanlah seseorang yang mengindahkan semua persyaratan ini, melainkan seseorang yang memiliki suatu watak yang tulus dan tulen serta berkeinginan menjadi adil dan bukannya sekedar tampak adil."³ Pendapat ini menempatkan manusia sebagai makhluk moral (moral being) atau pelaku moral (moral agent). Dengan kesadaran moral ini sikap hidup setiap manusia Indonesia seharusnya sebagai berikut: (1) meletakkan kepentingan pribadinya dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat; (2) merasakan kewajibannya kepada masyarakat lebih besar daripada kepentingan diri sendiri.⁴

Beradab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta artinya: sopan, baik budi bahasanya atau telah maju tingkat kehidupan lahir-batinnya. Dalam uraian ini beradab diartikan sebagai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena biasanya orang yang sopan dan baik budi bahasanya memandang sesamanya seperti ia memandang dirinya sendiri. Hal ini terwujud dalam sikap harga-menghargai di antara sesama manusia. Kemanusiaan mewajibkan kita memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Kita dilarang memperlakukan seseorang di luar batas peri kemanusiaan berupa tindakan kejam (memukul, membunuh, menahan orang tanpa batas waktu, memperkosa, memfitnah) ataupun main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita anggap sebagai hak kita. Perbuatan seperti ini melanggar hak-hak dan kebebasan asasi manusia.

¹Drs. C.S.T. Kansil SH, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 174-175.

²Kirdi Dipoyudo, *op. cit.*, hal. 27-47.

³The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan* (Yogyakarta: Penerbit Super, 1979), hal. 29-30.

⁴Prof. Padmo Wahjono SH, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 51.

Hak-hak itu dapat dirumuskan sebagai hak untuk tidak diperbudak, tidak dianiaya, tidak ditangkap dan dibuang secara sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan menurut undang-undang yang berlaku. Sikap yang beradab membimbing kita untuk selalu luwes dalam pergaulan, baik dalam tegur-sapa terhadap sesama, mampu mengendalikan diri dan sanggup menghargai dan menghormati orang lain. Ini berarti bahwa tata pergaulan manusia yang beradab menuntut sikap toleransi.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ini berarti bahwa semua orang mempunyai derajat, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak membedakan manusia berdasarkan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, golongan kepentingan, jenis kelamin, kedudukan sosial ataupun warna kulit. Dengan demikian sikap diskriminatif dalam tata pergaulan di antara golongan-golongan masyarakat merupakan hal yang tercela. Kemanusiaan yang adil dan beradab menurut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila mewajibkan kita untuk: (1) mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban semua orang; (2) mencintai sesama manusia; (3) mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) tidak sewenang-wenang terhadap orang lain; (5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) berani membela kebenaran dan keadilan; (8) sebagai bangsa Indonesia merasa diri kita sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.¹ Dengan demikian terlihat perbedaan sikap hidup di negara Pancasila dengan sikap hidup di negara liberal dan negara totaliter. Di negara Pancasila terdapat penghargaan yang tinggi terhadap martabat manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, sedangkan di negara liberal terdapat sikap kurang menghormati sifat sosial manusia dan di negara totaliter terdapat sikap mengabaikan kemerdekaan perseorangan.²

PENUANGAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM UUD 1945

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 maupun Penjelasannya. Dalam Pembukaan, alinea pertama terdapat pernyataan yang berbunyi: "... maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan

¹Prof. Padmo Wahjono SH, *op. cit.*, hal. 55.

²Rahmat Subagio, *op. cit.*, hal. 92.

peri keadilan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia tidak menerima penindasan manusia yang satu terhadap manusia lainnya ataupun penindasan bangsa yang satu terhadap bangsa lainnya, dan terus berikhtiar untuk menata kehidupan yang bebas sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini ditegaskan lebih lanjut pada alinea keempat: ” ... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan bangsa Indonesia bukanlah kemanusiaan yang terbatas pada ruang lingkup kebangsaan semata tetapi kemanusiaan yang bersifat internasional, yang pada hakikatnya mengakui bahwa seluruh umat manusia adalah sama dalam hak dan kewajiban asasinya.

Dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 sila kedua Pancasila ini terdapat dalam beberapa pasal, yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 26, 27, 28, 29 ayat 2, 30, 31 dan 34. Secara umum pasal-pasal itu memuat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 terlihat hak rakyat sebagai warga negara yang memegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Ini berarti bahwa pemerintah negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu kewajiban umum pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (membina kesatuan dan persatuan bangsa), memajukan kesejahteraan umum (melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap dan berencana), mencerdaskan kehidupan bangsa (memberikan kesempatan yang sama besar kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” ini sesuai dengan sifat negara kita yang integralistik, yaitu ”negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala paham golongan dan perorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya,”¹ kata Prof. Dr. Supomo. Hal ini sejalan dengan isi pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945: ”Negara” begitu bunyinya ”melindungi *segenap* bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan* dengan mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara *persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan.”² Secara demikian negara juga bertugas

¹Dikutip dari Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* (Jakarta: 1971), Jilid 1, hal. 113.

²Lihat Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

menjamin ketertiban hidup masyarakat sebab hanya dalam masyarakat yang tertib negara dapat melaksanakan tugas lainnya, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 26 UUD 1945 memuat ketentuan tentang siapa yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Dengan tegas dikatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain (misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab, India yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah air tempat lahirnya, bersikap setia kepada negara RI) dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Apabila demikian, maka status dan peran semua warga negara Republik Indonesia adalah sama. Karena itu lebih lanjut Pasal 27 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Oleh karena itu setiap warga negara juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti bahwa sikap diskriminatif di antara sesama warga negara berdasarkan suku, agama, ras ataupun golongan kepentingan tidak sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap diskriminatif ini tidak dibenarkan dalam tata pergaulan kemasyarakatan kita maupun dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan langsung dengan bidang-bidang kehidupan dan kegiatan warga negara.

Pasal 28, 29 ayat 2 dan 34 UUD 1945 mengatur kedudukan warga negara ataupun penduduk lainnya yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Seperti ditegaskan dalam penjelasannya pasal-pasal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Pasal 28 mengakui hak warga negara dan penduduk lainnya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan ataupun tertulis, tetapi semuanya itu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Ini menunjukkan bahwa kebebasan dan demokrasi di negara kita berbeda dengan kebebasan dan demokrasi di negara-negara liberal. Kebebasan dan demokrasi kita berlandaskan keseimbangan di antara hak dan kewajiban sebagai warga negara atau penduduk. Ini berarti bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu/kelompok tidak boleh dipergunakan untuk merugikan/menghilangkan kebebasan yang dimiliki oleh individu/kelompok lain sebagai sesama warga negara. Agar keseimbangan ini terjamin, maka negara mengaturnya dengan undang-undang.

Pasal 29 ayat 2 menetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu. Kemerdekaan ini merupakan salah satu hak yang paling asasi. Kebebasan agama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama ini bukan pemberian negara atau golongan.¹ Ini berarti bahwa negara tidak boleh memaksa para warganya untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama tertentu. Di dalam negara seperti ini setiap umat beragama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikian pula negara, dalam mengatur kehidupan masyarakat bangsa, wajib memberikan perhatian yang sama besar kepada masing-masing umat beragama. Umat beragama yang berbeda-beda itu perlu memiliki semangat kebersamaan, yaitu sebagai sesama warga negara Republik Indonesia. Kerukunan hidup antar umat beragama yang diartikan sebagai sikap saling mengerti, saling memahami peranan dan fungsi masing-masing, kemudian saling menerima dan berkomunikasi sebagai sesama warga negara perlu dibina.

Pasal 34 menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menunjukkan bahwa negara sebagai suatu organisasi otoritas² merupakan pihak yang berwenang mengatur kehidupan para warganya demi terciptanya ketertiban hidup bersama warga negara. Golongan fakir miskin dan anak-anak terlantar termasuk para penderita cacat tetap dan jompo yang sudah tidak mampu mengelola hidupnya sendiri harus dipelihara oleh negara. Ini berarti bahwa negara wajib berusaha untuk menempatkan setiap warganya sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu negara melalui Departemen Sosial perlu lebih banyak mengembangkan karya-karya sosial seperti panti asuhan bagi anak-anak terlantar dan anak-anak cacat, rumah penampungan bagi orang jompo dan sebagainya.

Pasal 30 menetapkan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut dalam usaha pembelaan negara. Kemudian hal ini dikembangkan menjadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Ini berarti bahwa setiap warga negara harus ikut dalam pembelaan negara apabila negara terlibat dalam suatu peperangan. Agar pengertian pembelaan negara ini menjadi jelas, Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani memberikan penjelasan berikut. Konsepsi Hankamrata janganlah diartikan secara sempit, yaitu apabila negara terlibat dalam perang maka seluruh rakyat Indonesia harus mahir memegang dan mempergunakan senjata dan ikut dalam medan perang. Bukan itu. Yang benar adalah bahwa seluruh potensi nasional dikerahkan dan disatupadukan sebagai satu upaya bersama yang terpusat dan terkendalikan un-

¹Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, bagian Penjelasan Atas Bab II Angka I.

²Prof.Dr. J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1975), hal. 95.

tuk mendukung kemampuan dan kesanggupan berperang. Artinya yang mahir memegang senjata dipersenjatai terjun ke medan perang, yang memproduksi tetap memproduksi dengan baik sehingga terbentuk suatu logistik yang berlanjut.¹ Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa dalam pembelaan negara ini manusia Indonesia tetap ditempatkan sesuai dengan martabatnya, sehingga wajib militer tidak perlu diterapkan secara harafiah bagi semua warga negara.

Pasal 31 menetapkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Melalui pengajaran nasional kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan merupakan modal utama setiap manusia dalam usaha memanusiakan dirinya. Oleh karena itu kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia perlu diberikan kesempatan yang sama besar untuk masuk ke semua jenis dan tingkat pendidikan, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dewasa ini pemerintah rupanya belum mampu menyediakan semua sarana dan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal. Hal yang perlu segera dipecahkan adalah tidak sebandingnya daya tampung untuk setiap jenis dan tingkat sekolah dengan jumlah anak yang ingin memperoleh tempat di sekolah-sekolah. Mengingat hal itu pemerintah memberikan kesempatan kepada badan-badan swasta untuk turut mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah. Namun sudah menjadi keluhan masyarakat bahwa sekolah-sekolah swasta yang baik mutunya umumnya mahal. Sebagai akibat mahalnya sekolah swasta dan kurangnya daya tampung di sekolah negeri terutama untuk tingkat sekolah menengah ke atas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menjadi terbatas. Oleh karena itu lapisan masyarakat yang lemah ekonominya umumnya selalu kalah bersaing dalam merebut kesempatan memperoleh pendidikan itu. Keadaan ini perlu segera diperbaiki karena pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk mengangkat martabat kemanusiaan kita.

Setelah mencoba melihat penuangan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pasal-pasal UUD 1945 itu dan menghadapkannya dengan beberapa kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, kita dapat mengatakan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dapat dilaksanakan semestinya.

¹*Sinar Harapan dan Berita Buana*, 29 Juni 1983.

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional bermaksud membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti bahwa pembangunan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani setiap manusia Indonesia dan harus meliputi seluruh wilayah tanah air kita. Pembangunan harus memungkinkan setiap manusia Indonesia di bawah pengarahan pemerintah keluar dari kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, keterbelakangan dan penyakit, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya masing-masing. Dan ini berarti bahwa kita masing-masing menempatkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaan kita.

Dalam pembangunan yang bermaksud menempatkan manusia Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaan ini, setiap manusia Indonesia menduduki tempat sentral dalam arti bukan sebagai pelaku pembangunan semata tetapi sekaligus sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Hal ini telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Soeharto antara lain: "Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan"¹ dalam arti bahwa "... tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya."² Ini berarti kita wajib ikut secara aktif dalam kegiatan pembangunan terutama dalam usaha meningkatkan produksi sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Peningkatan produksi kerja ini akan menaikkan jumlah pendapatan kita dan hal ini berarti meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Dalam rangka itu para pengusaha, industrialis, pemilik perkebunan, pemilik tanah pertanian yang luas di desa-desa tidak boleh menjadikan buruh atau karyawannya sebagai tenaga produksi semata. Apabila hal ini terjadi maka pembangunan hanya akan membawa manfaat bagi sekelompok kecil masyarakat pemilik alat-alat produksi dan menelantarkan sebagian besar masyarakat.

Selama Pelita III pemerintah telah berusaha sungguh-sungguh agar gejala itu tidak menjadi satu kenyataan yang permanen dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1978 Presiden Soeharto menggariskan delapan jalur pemerataan pembangunan dan hasilnya.³ Kedelapan jalur itu adalah: (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan

¹Pidato Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta (Jakarta: Departemen P dan K, 1975), hal. 5-6.

²Krissantono (ed.), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 41.

³Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1978, hal. 34.

pokok rakyat banyak; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan partisipasi dalam pembangunan; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air; (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Kedelapan jalur itu kemudian dimasukkan dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 1979/1980 dan secara demikian menjadi kebijaksanaan resmi pemerintah.

Kedelapan jalur pemerataan itu pada pokoknya bertujuan menempatkan setiap manusia Indonesia sesuai dengan martabatnya. Ini berarti bahwa kedelapan jalur pemerataan itu juga merupakan perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab di samping sila Keadilan sosial. Oleh karena itu kedelapan jalur pemerataan ini harus benar-benar dilaksanakan baik oleh pemerintah sebagai penyusun rencana dan program-program pembangunan nasional maupun seluruh rakyat Indonesia sebagai subyek dan tujuan dari pembangunan nasional ini. Mengingat aspek-aspek pemerataan itu dirasakan secara individual ataupun bersama-sama, maka setiap orang atau kelompok harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, berusaha dan keadilan yang sama besar. Menciptakan suasana yang memberi peluang kepada setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama ini berarti menempatkan manusia Indonesia sesuai dengan martabat dan haknya sebagai warga negara.

Salah satu langkah utama yang perlu diambil pemerintah dalam usaha melaksanakan jalur-jalur pemerataan itu adalah memperluas kesempatan kerja baik di desa maupun di kota dan membina/mengembangkan jenis-jenis ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Setiap warga negara yang memiliki ketrampilan hendaknya dapat memilih jenis pekerjaan yang sesuai dan hal ini berarti meningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan demikian pendapatannya juga bertambah sehingga kebutuhan pokoknya secara bertahap dapat dipenuhi juga. Selain itu hal ini akan menimbulkan kepercayaan pada dirinya, harga diri dan kesadaran akan martabatnya sebagai manusia utuh. Selanjutnya warga negara yang memiliki harga diri serta kepercayaan pada diri sendiri dan sadar akan martabatnya sebagai manusia merupakan modal utama pembangunan nasional.

Sebagai penutup kami perlu menegaskan kembali beberapa hal. *Pertama*, sila ini menempatkan setiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu penindasan manusia oleh manusia lainnya tidak dibenarkan. Dalam lingkungan dunia usaha hubungan antara pengusaha dan karyawannya harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Ini berarti

bahwa setiap karyawan berhak mendapat pekerjaan dengan upah yang cukup untuk kehidupan pribadi dan keluarganya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. *Kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila dalam Pancasila pada tingkat pelaksanaannya tidak boleh dipisahkan dari sila-sila lain. Melalui sila ini Indonesia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai derajat, hak dan kewajiban terhadap negara bangsa yang sama. Oleh karena itu perbedaan manusia Indonesia berdasarkan suku, agama, keturunan, golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial ataupun warna kulit tidak dibenarkan dengan alasan apa pun. Sikap diskriminatif merupakan hal yang tercela. *Ketiga*, kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin hak milik setiap warga negara karena dengan hak milik perorangan itu setiap orang akan terus bekerja. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan hak milik perorangan itu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa hak milik perorangan itu tidak boleh digunakan untuk merugikan masyarakat tetapi harus digunakan untuk mempertinggi martabat sesama manusia sebagai warga negara. Oleh karena itu masalah pemerataan adalah suatu masalah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam usaha mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini.

Humanisme: Arti dan Pokok-pokok Pikirannya

Kirdi DIPOYUDO

Untuk memahami kemanusiaan yang adil dan beradab, agar dapat menghayati dan mengamalkannya sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat dan negara, kita hendaknya juga mempelajari sejarah terjadinya, termasuk pengaruh ide-ide besar dunia. Presiden Soeharto pernah menegaskan: "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri."¹ Dalam Penjelasan pasal 32 UUD 1945 itu sendiri ditandaskan bahwa usaha kebudayaan kita "tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkannya atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia." Sehubungan dengan itu diperlukan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.

Salah satu ide besar dunia yang rupanya ikut mengilhami Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah humanisme yang muncul dan berkembang di dunia Barat tetapi kini telah diterima secara universal dan menjadi pedoman PBB, UNESCO dan badan-badan internasional lain.

Humanisme muncul di Italia sebagai suatu gerakan kembali ke studi-studi Yunani dan Romawi kuno, yang juga disebut *Pengetahuan Baru* (New

¹Sambutan pada peringatan hari ulang tahun Parkindo yang ke-24 di Surabaya pada 15 Nopember 1969. Lihat Krissantono (ed.), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 10.

Learning). Gerakan ini dinamakan "baru" oleh sebab mendekati karya-karya klasik Yunani dan Romawi itu karena dirinya sendiri, bukan karena penggunaannya untuk agama Kristen, lagi pula percaya bahwa studi-studi itu merupakan ungkapan tertinggi nilai-nilai manusia dan sarana yang baik untuk mengembangkan individu yang bebas dan bertanggung jawab. Istilah itu berasal dari kata Italia abad ke-15 *humanista*, yaitu guru yang mengajarkan karya-karya klasik itu.¹

Akan tetapi sejak awal abad ke-20 ini, kata humanisme itu mendapat arti yang lebih luas dan berarti filsafat atau pandangan dunia yang secara teoretis mengakui serta menghargai sifat khas manusia dan secara praktis mengukuhkan, membela dan mengembangkannya. Filsafat ini berkisar pada *otonomi manusia* sebagai makhluk berakal budi dengan martabat luhur yang dalam dirinya sendiri mempunyai sumber kebenaran dan kebaikan. Mahkamah banding tertingginya adalah akal budi manusia dan tujuannya harta terbesar manusia dalam eksistensinya yang terbatas. Humanisme bisa tetapi tidak perlu terjalin dengan agama, ilmu pengetahuan atau sistem politik tertentu. Semangatnya sekuler atau duniawi, liberal dalam arti pro-kemerdekaan manusia dan toleran; metodenya pendidikan, penelitian bebas dan penerangan (enlightenment). Cita-cita dasarnya diringkas dalam ucapan filsuf Yunani Protagoras (abad ke-5 SM) "Manusia adalah ukuran segala sesuatu" dan merupakan suatu bagian warisan jaman Yunani dan Romawi kuno yang kaya. Warisan itu disalurkan ke dunia Barat sebagian lewat Byzantium dan orang-orang Arab tetapi sebagian besar lewat pemikir-pemikir Kristen abad pertengahan.

Di masa lampau terdapat pertentangan hebat antara humanisme dan agama, khususnya agama Katolik. Sekitar 50 tahun yang lalu humanisme memang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama, misalnya penolakan terhadap transendensi manusia, hidup kekal dan lain sebagainya. Sebaliknya di pihak agama pun terdapat kesalahan karena adanya anggapan bahwa sikap yang dianjurkan oleh humanisme tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan dan sikap yang tidak secara eksplisit mengakui Tuhan pada waktu itu sudah dianggap menyangkal adanya Tuhan atau anti-agama. Selain itu pandangan banyak orang beriman belum menghargai apa yang disebut dunia profan (lawan dunia sakral). Pertentangan semacam itu sebenarnya tidak perlu dan kini terdapat saling pengertian.² Dalam

¹Mengenai sejarah humanisme lihat Leona C. Gabel, "Humanism," dalam *Encyclopaedia Americana* (New York, 1971), Jilid 14, hal. 553-554; dan Edward P. Cheyney, "Humanism: Historical Aspects," dalam Edwin R.A. Seligman (ed.), *Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York, 1962), Jilid 7, hal. 537-542.

²Lihat Driyarkara tentang *Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hal. 45.

salah satu dokumen penting ditegaskan bahwa "kita menyaksikan lahirnya suatu humanisme baru, suatu humanisme yang membatasi manusia pertamanya dengan tanggung jawabnya untuk saudara-saudaranya dan untuk sejarah ... Perkembangan semacam itu sangat penting untuk kedewasaan spiritual dan moral umat manusia."¹

PANDANGAN POKOK HUMANISME

Dalam humanisme dapat dibedakan bermacam-macam aliran, akan tetapi di samping perbedaan, dalam semua aliran itu terdapat *pandangan pokok bersama*, khususnya mengenai manusia dan karya manusia. Dalam semua aliran humanisme itu terdapat persamaan usaha untuk menerima secara serius dan menyerap apa yang bisa dinamakan "konsep modern manusia."²

Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa "konsep modern manusia" itu bukanlah suatu definisi abstrak tertentu, melainkan cara manusia pada saat sejarah tertentunya dan dalam suatu konteks budaya tertentu memahami, menekankan dan mengungkapkan dirinya dalam karyanya; apa yang membedakan manusia dari benda-benda dan hewan; dengan kata lain apa yang merupakan keagungan sejati manusia.

Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa suatu pemahaman diri tertentu manusia melandasi setiap jaman dan setiap bentuk humanisme. Secara demikian sejarah meninggalkan kepada kita *banyak definisi manusia* sesuai dengan banyaknya aliran humanisme. Definisi-definisi semacam itu sangat baik sejauh menolong kita melihat dengan lebih jelas apakah yang merupakan *keagungan manusia*. Misalnya Aristoteles, ketika menyebutkan situasi warga bebas dalam negara kota Yunani, membatasi manusia sebagai "hewan politik," suatu hewan yang berkat akal budinya mampu membangun suatu kota. Abad Pertengahan Kristen melihat kemuliaan manusia dalam "keinginan alamiahnya untuk melihat Tuhan," jaman Descartes dan Pascal dalam *pemikirannya*. Humanisme abad ke-19, yaitu humanisme Revolusi Perancis, terutama melihat keagungan manusia dalam *kebebasannya*. Di lain pihak; Marxisme yang ingin menjadi humanisme revolusi proletar membatasinya dengan karyanya dalam arti yang luas.

Dengan demikian timbul pertanyaan apakah yang merupakan ciri "pengertian diri" manusia modern, pengertian mengenai manusia yang diusulkan

¹ Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern *Gaudium et Spes* (1965), paragraf 55 dan 53.

² Bagian ini diambil dari Albert Dondeyne, *Modern Humanism and Christian Faith in God*, hal. 10-16.

filosof kontemporer untuk direnungkan dan disajikan dalam suatu uraian yang disusun secara logis dan sistematis.

Ciri utama filsafat manusia dewasa ini, baik filsafat fenomenologis dan eksistensialis maupun Marxis dan strukturalis, ialah bahwa ia lebih berkisar pada *gagasan kebudayaan* daripada gagasan alam. Sekalipun selalu berakar pada alam, manusia bukanlah semata-mata suatu bagian alam semesta. Pada hakikatnya ia adalah pencipta dan penghasil kebudayaan, pembangun suatu dunia, originator sejarah yang aktif. Pada pokoknya manusia adalah suatu kebebasan yang menjelma, dalam arti bahwa ia berada hanya dengan menyatakan dan mengungkapkan dirinya dalam materi. Melakukan hal-hal itu adalah karyanya. Manusia hanya dapat menyempurnakan dirinya dengan menyempurnakan alam.

Penyadaran manusia bahwa menguasai, mengolah dan menyempurnakan dunia merupakan tugasnya berarti penemuan kembali *sejumlah nilai* yang sangat penting dan mempunyai arti moral yang jauh jangkauannya untuk hari depan umat manusia.

Pertama-tama, *nilai karya*. Kalau benar bahwa humanisasi dunia adalah karya manusia, kita dapat mengatakan bahwa pada pokoknya manusia adalah makhluk yang berkarya dan bahwa sejarah didasarkan atas karya dalam arti yang luas, yang diberikan oleh para pemikir sejak Hegel. "Karya," Merleau-Ponty menulis, "bukanlah semata-mata produksi kekayaan, tetapi dalam arti yang lebih umum, kegiatan dengan mana manusia memproyeksikan suatu lingkungan manusiawi di sekitarnya, dan dengan mana ia mengatasi data alamiah eksistensinya."¹ Apakah karya itu pekerjaan tangan, riset ilmiah atau teknologi, atau organisasi ekonomi dan sosial dunia, bekerja berarti membuat dunia suatu tempat yang lebih baik bagi manusia untuk hidup. Dalam semuanya itu kita menyaksikan pelaksanaan arti *humanisasi karya*. Bagi manusia modern, beriman atau tidak beriman, karya bukan lagi nasib budak atau konsekuensi dosa, melainkan suatu *dimensi pokok dan universal manusia*. Adalah salah satu tugas besar abad kita ini memadukan kondisi kerja dengan arti humanisasi dan etisnya.

Akan tetapi manusia juga mengungkapkan dirinya lewat *bahasa*. Istilah ini harus diambil dalam arti yang luas dan menunjuk pada apa yang bisa disebut kemampuan simbolis manusia, yaitu kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya, untuk menciptakan dan bertukar informasi lewat suatu sistem tanda yang bukan saja mencakup bahasa lisan dan tertulis tetapi juga karya-karya seni, upacara dan mitos.

¹Maurice Merleau-Ponty, *Sense et non-sense* (Paris: Negel, 1948).

Bahasa bukan lagi dilihat sebagai reproduksi lahiriah gagasan yang telah dibentuk dalam kesadaran. Bisa dikatakan bahwa gagasan hanya timbul dalam dan lewat bahasa. Bahasa adalah suatu sarana untuk memberikan bentuk kepada dunia, untuk membuat dunia. Kata yang otentik mengungkapkan. Mengenai bahasa Heidegger menulis "barang-barang itu sendiri datang pada kata" dan "Hanyalah dalam kata, dalam bahasa, bahwa barang-barang menjadi dan berada."¹

Rehabilitasi kata ini membawa kita pada nilai yang ketiga, yaitu *nilai solidaritas*. Dalam kenyataan, dengan mengungkapkan dirinya dalam prestasi budayanya lewat karya dan kata, manusia membuat dirinya dikenal dan menjadi bermanfaat bagi sesamanya. Karya dan kata bukanlah semata-mata kaitan antara kebebasan intern roh dan dunia lahiriah materi, tetapi juga antara orang-orang bebas dan antara generasi-generasi yang saling menyusul. Adalah lewat karyanya bahwa Plato masih hidup di tengah-tengah kita. Dengan kata lain, kata merupakan landasan solidaritas dan inter-subyektivitas antar manusia, lagi pula memungkinkan kita berada *dengan* sesama, *berkat* sesama dan *untuk* sesama. Oleh sebab itu manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap sesamanya dan di depan sejarah. Dalam suatu naskah termasyur, yang secara mengagumkan mengungkapkan apa yang paling besar dalam humanisme modern, Saint-Exupéry menulis: "Sebagai manusia saya bertanggung jawab, merasa malu bila berhadapan dengan kesengsaraan yang tampaknya tidak berasal dari saya, merasa bangga atas kemenangan yang diperoleh kawan-kawan saya, dan pada waktu saya meletakkan suatu batu merasa bahwa saya menyumbang pada pembangunan dunia."²

Akan tetapi merasa bertanggung jawab atas sesama manusia adalah mewujudkan apa yang merupakan keagungan sejati manusia, yang pada analisa terakhir membedakannya dari hewan, lebih merupakan budi moralnya daripada budi ilmiah dan teknisnya. Kebanyakan filsafat modern adalah filsafat manusia yang mengumandangkan *primat (keulungan) dunia etis*. Dimensi etis merupakan esensi manusia yang paling dalam; ia membatasi manusia sebagai keterbukaan dan transendensi, artinya melampaui dirinya sendiri.

Itulah secara singkat gagasan modern mengenai manusia. Dalam sejarah humanisme gagasan itu menawarkan dirinya sebagai suatu doktrin mengenai manusia yang aktual dan historis, yang dipanggil untuk hidup di suatu dunia yang dewasa, sekuler dan majemuk. Gagasan itu lebih dari suatu ontologi

¹Asli Jermannya "Im Wort, in der Sprache, werden und sind erst Dinge." Lihat Martin Heidegger, *Einführung in die Metaphysik*.

²Antoine de Saint-Exupéry, *Terre des Hommes* (Paris: Gallinard, 1961).

yang semata-mata spekulatif. Ia juga mempersembahkan dirinya sebagai suatu himbauan akan tanggung jawab kolektif dan akan solidaritas antar manusia dalam dan di depan sejarah.

PERJUANGAN HUMANISME

Sekitar pandangan pokok humanisme itu terdapat *sejumlah* *dalil* seperti dimuat dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan di Paris pada tahun 1966. Pernyataan ini hendaknya dibaca sebagai suatu petunjuk mengenai apa yang diperjuangkan oleh humanisme, bukan sebagai suatu pernyataan yang tuntas mengenai humanisme. Bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Humanisme mengungkapkan suatu keyakinan moral; ia merupakan penerimaan tanggung jawab untuk kehidupan manusia di dunia.
2. Ia merupakan suatu cara hidup yang mengandalkan kemampuan-kemampuan manusia dan sumber-sumber daya alam maupun sosial.
3. Moral humanis mulai dengan diakuinya interdependensi antar manusia dan perlunya saling menghormati.
4. Humanisme etis menyerukan suatu eksistensi berarti yang dijadikan berharga lewat komitmen dan penerimaan manusia, sebagai suatu landasan penikmatan dan pemenuhan.
5. Manusia menjadi manusiawi dalam masyarakat; masyarakat hendaknya menyediakan kondisi untuk perkembangan selengkap mungkin setiap orang.
6. Perkembangan manusia membutuhkan berlanjutnya perbaikan kondisi penelitian bebas dan suatu masyarakat terbuka.
7. Pengetahuan ilmiah yang dicapai dan diterapkan secara progresif merupakan sarana yang paling terandalkan untuk memperbaiki kesejahteraan.
8. Kemajuan manusia adalah kemajuan dalam kebebasan untuk memilih; keadilan manusia adalah pelaksanaan persamaan secara progresif.
9. Keadilan tidak mengesampingkan kekerasan, tetapi satu-satunya penggunaan kekerasan yang diinginkan adalah untuk menindas penggunaan kekerasan.
10. Humanisme etis mengukuhkan kesatuan umat manusia dan suatu tanggung jawab bersama semua orang untuk semua orang.¹

¹Lihat J.P. van Praag, *The Humanist Outlook*, hal. 3-9.

Pernyataan ini menunjukkan *rangkaian sikap dan komitmen humanis bersama*. Para humanis mempunyai banyak komitmen bersama dengan kaum beriman yang diterangi (enlightened), dan bermacam-macam sikapnya juga melintasi garis-garis perbatasan filsafat-filsafat dan agama-agama yang besar. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan manakah *ciri-ciri* seorang humanis.

Jawaban atas pertanyaan ini mungkin paling baik diberikan dengan menerangkan *sikap mental yang mendahului seluruh teori dan prakteknya*. Konsep "sikap mental" mencakup suatu unsur keterarahan dan komitmen. Mungkin denominator seluruh humanisme harus dicari di sini dalam perasaan dibimbing oleh suatu direktif fundamental; perasaan ini merupakan titik tolak segala filsafat, pandangan atas dunia dan kehidupan, atau praktek pribadi maupun sosial.

Orang bisa "mempunyai" suatu konsep tertentu, tetapi sikap mental merupakan ciri seluruh pribadi seorang. Bersama orientasi orang pada kehidupan dan konsep manusia serta dunia yang bersumber pada titik tolak semacam itu, ia merupakan suatu keyakinan moral. Dengan demikian suatu keyakinan moral adalah suatu pola orientasi di mana sikap mental merupakan titik tolak bagi suatu konsep mengenai manusia dan dunia. Humanisme adalah suatu *keyakinan moral yang berdasarkan manusia dalam kemanusiaannya* yang membedakannya dari Tuhan maupun hewan. Ia bertujuan untuk memahami kehidupan dan dunia dengan kemampuan-kemampuan manusia dan mewujudkan sifat khas kemanusiaan bersama. Tafsir istilah "humanisme" ini tidak menyangkal sifat humanis banyak agama, apalagi sifat manusiawinya. Namun agama-agama tidak didasarkan atasnya, biarpun kadang-kadang mengakui sifat-sifat manusia sepenuhnya. Titik tolak agama adalah wahyu Tuhan, sedangkan humanisme bercirikan *asal insaninya*. Agama-agama mengungkapkan dirinya seolah-olah berada dalam "permainan bahasa" yang berbeda yang menunjuk pada cara-cara yang berlainan untuk menafsirkan kenyataan. Humanisme menempatkan manusia pada suatu *posisi sentral* dan mengarahkan pandangannya ke *kehidupan sosial dan empiris*. Dengan demikian humanisme mengambil sifat suatu keyakinan moral yang menyeluruh.

Untuk merumuskan suatu konsep bersama mengenai sikap mental yang mendasari semua aliran humanisme, kita harus menemukan dalam humanisme modern unsur-unsur yang mendahului segala tafsir khususnya, baik filosofis maupun praktis. Paling tidak orang bisa mengisyaratkan beberapa unsur semacam itu. Soalnya ialah menemukan *beberapa postulat pemikiran manusia* yang harus ada. Suatu postulat bukanlah suatu hipotesa yang harus dibuktikan dengan pemikiran atau pengalaman, tetapi suatu titik tolak yang memungkinkan orang berpikir dan mengalami dengan cara tertentu.

POSTULAT-POSTULAT HUMANISME

Suatu usaha untuk merumuskan beberapa titik tolak serupa itu mencakup rangkaian postulat berikut: persamaan, sekularitas, kebebasan, persaudaraan, akal budi, pengalaman, eksistensi, kontingensi, evolusi.

1. *Persamaan*. Orang-orang mempunyai struktur biologi dan mental yang sama. Berdasarkan persamaan ini, perbedaan-perbedaan antara orang-orang yang tidak dapat disangkal tampak tidak relevan. Semuanya itu dilihat dalam kerangka persamaan hakiki semua orang. Dengan konsepsi ini mereka pada pokoknya hidup dalam suatu dunia bersama.
2. *Sekularitas*. Manusia adalah bagian dunia dan terarah padanya. Manusia berasal dari suatu kenyataan dan merupakan bagian kenyataan itu. Secara demikian ia merupakan suatu rangkaian hubungan. Akan tetapi ia juga merupakan suatu pusat aksi. Sebagai makhluk yang berkemauan, ia membentuk dunianya secara mental maupun dalam kenyataan.
3. *Kebebasan*. Manusia memberi arti kepada hidupnya dengan mengambil keputusan secara bebas. Kebebasan di sini berarti kebebasan "memilih." Sebagai makhluk yang relatif tidak tentu, manusia harus membentuk hidupnya sendiri lewat penentuan-diri dan secara demikian memberikan arti manusiawi kepada hidupnya. Kebebasan meliputi toleransi, yang dipikirkan bukan sebagai sikap acuh tak acuh melainkan sebagai hormat terhadap perorangan dalam keyakinannya yang jujur.
4. *Persaudaraan*. Manusia dimaksud untuk komunitas; komunitas membentuk perorangan. Penentuan-diri mencakup komunitas. Penentuan-diri dalam komunitas memberikan arti hidup manusia maupun ukuran (moral, sosial dan teoretis) untuk pertimbangan.
5. *Akal budi*. Manusia adalah makhluk yang menilai. Dengan menerapkan rasionalitas bersama pada penilaian-penilaiannya, ia mengembangkan ukuran untuk kebenaran, kesusilaan dan keindahan yang bersama-sama merupakan kemampuan akal budi. Akal budi adalah ujian dan pertimbangan dan tanggung jawab manusia.
6. *Pengalaman*. Dunia dapat dialami lewat identifikasi dan observasi. Identifikasi adalah sintetis dan memberikan pengalaman religius, sedangkan observasi adalah analitis dan memberikan pengetahuan. Identifikasi dan observasi bersifat komplementer satu sama lain.
7. *Eksistensi*. Dunia dan orang-orang ada (dapat dilihat secara langsung atau tidak langsung) dalam koherensi yang tidak dapat dipecah. Apa pun tafsir filosofis gejala ini, manusia dan dunia dipikirkan sebagai saling bergantung. Dunia adalah suatu dunia "manusia" dan manusia adalah makhluk duniawi.

- 8. *Kontingensi*. Dunia tidak mengungkapkan arti baik sebagai harmoni maupun pengarah. Manusialah yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan arti. Dunia tidak memberikan jaminan untuk kehidupan manusia, tetapi suatu kerangka untuk perkembangan manusia.
- 9. *Evolusi*. Dunia dipikirkan sebagai dinamis dalam struktur evolusioner dan kausalnya, artinya sebagai berkembang dalam koherensi yang sah. Ia adalah formula sifat dinamisnya dan memungkinkan manusia hidup dalam dan dengan kenyataan dan bertindak atasnya. Secara demikian ia membentuk kenyataan menjadi lingkungan manusia.

TIGA GARIS PERKEMBANGAN

Ringkasan konsep humanis ini sama sekali tidak melukiskan segala variasi pemikiran dan tindakan humanis, tetapi hanya bermaksud membatasi suatu *landasan dasar segala keyakinan humanis*. Akan tetapi di atas landasan ini struktur-struktur yang paling beraneka ragam pun bisa didirikan. Sejak Renaissance orang paling sedikit dapat membedakan *tiga garis perkembangan* yang terus-menerus terjalin satu sama lain: garis reflektif, garis sosial dan garis empiris.

Garis reflektif khususnya kuat dalam filsafat Jerman, misalnya filsafat Jaspers. Ia mempunyai suatu tendensi moral dan religius yang kuat. Ia sangat memikirkan pendidikan dan pemberian nasihat. *Garis sosial* membentang dari Bentham, Comte dan Marx ke misalnya Nath Roy dan banyak Marxis modern seperti Markovic. Ia berusaha merumuskan suatu kriterium humanis bagi tindakan sosial dan bercirikan tiga rangkai "memberitahu, melakukan dan membaharui" (inform, perform and reform). *Garis empiris* khususnya membentang dari Bacon dan kaum empiris Anglo-Saksis ke kaum positivis logis seperti Bertrand Russell dan Ayer dan bermacam-macam jenis ilmuwan. Mereka menekankan tanggung jawab spesifik manusia berdasarkan sifat spesifiknya. Dalam arti modern yang lebih luas, pemikiran modern ikut menyumbang pada ketiga garis perkembangan humanis itu, di bidang filsafat maupun ilmu pengetahuan, dalam ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, psikologi dan sosiologi maupun ilmu-ilmu fisika seperti biologi, fisika dan astronomi. Bersama-sama ketiga garis perkembangan itu merupakan suatu gambaran yang benar-benar modern mengenai kehidupan dan dunia.

Segala variasi humanis merupakan suatu pendekatan terhadap kenyataan yang mengandalkan sumber-sumber daya alam maupun sosial. Pandangan ini menerima nilai-nilai manusia sebagai final dalam tata alam semesta. Lagi pula, dalam bentuk modernnya, ia bukan saja bermaksud menafsirkan manusia dan dunia secara manusiawi, tetapi juga memberikan suatu landasan un-

tuk kehidupan manusia yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sehari-hari.

Humanisme modern berpendapat bahwa pembentukan tujuan-tujuan manusia terletak di tangannya sendiri. Ia menentang suatu perasaan yang tersebar luas bahwa hidup di dunia adalah sia-sia. Penentuan-diri manusia dalam jalinan dengan orang-orang lain bisa memperkaya eksistensi pribadinya dan memberikan suatu pedoman bagi persatuan dengan orang-orang lain. Walaupun terdapat kesusahan, kesengsaraan, kesalahan dan penyakit yang harus dilewati seorang, komitmennya pada kehidupan manusia bisa membuat eksistensinya benar-benar berharga. Akan tetapi kehidupan manusia berarti hidup dalam komunitas atau kebersamaan. Prestasi manusia bergantung pada kebudayaan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat harus menyediakan kondisi untuk kesejahteraan para warganya. Kemajuannya adalah kemajuan dalam kebebasan untuk memilih dalam arti bahwa semakin banyak orang bisa melakukan atau tidak melakukan semakin banyak hal. Dan kebebasan sudah barang tentu berkaitan dengan keadilan sebagai kewajiban pilihan. Ini juga berlaku untuk masyarakat dunia. Oleh sebab itu seorang humanis mempunyai komitmen pada perjuangan untuk daerah-daerah terbelakang, tata dunia dan perdamaian dunia. Umat manusia bukanlah suatu kumpulan bangsa dan ras, tetapi suatu persatuan orang-orang, yang berarti suatu tanggung jawab bersama semua orang untuk semua orang.

Dengan demikian terdapat suatu sikap bersama dan komitmen bersama. Akan tetapi keduanya ini bersumber pada unsur-unsur bersama keyakinan yang membatasi identitas humanis. Tradisi humanis bukanlah suatu data yang begitu pasti artinya, tetapi *posisi tengah humanisme* memberikan suatu kunci. Posisi ini berkembang antara konsepsi-konsepsi yang telah mapan dan penghancurannya. Ia diarahkan untuk *mempertahankan nilai-nilai manusia sejati* sambil menggunakan cara-cara pengetahuan dan pemikiran yang paling baru. Ia bergerak di luar pola tradisional kehidupan tetapi menentang penghancuran apa yang dipandang sebagai nilai-nilai manusiawi sejati. Dalam perimbangan ini ia menerima petualangan eksistensi yang berbahaya sebagai suatu eksperimen yang memberikan suatu arti yang memuaskan kepada dunia yang mula-mula tidak mempunyai arti.¹

PENUTUP

Bahwa humanisme dan cita-citanya mendapat tempat yang terhormat di Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal

serta penjelasannya, dalam pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin Indonesia dan Ketetapan-ketetapan MPR, khususnya Ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam Pembukaan UUD 1945 kemanusiaan yang adil dan beradab ditetapkan sebagai dasar negara di samping keempat sila Pancasila lainnya. Sila ini kemudian dituangkan dalam ketentuan-ketentuan UUD. Antara lain ditetapkan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2), kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28), kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2), untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat 1). Selanjutnya pasal 34 menetapkan bahwa fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selain itu mengenai pasal-pasal 28, 29 ayat 1 dan 34 dikatakan dalam Penjelasannya bahwa pasal-pasal itu memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan.

Sesuai dengan itu Presiden Soeharto tak henti-hentinya menekankan arti penting kemanusiaan yang adil dan beradab dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya. Antara lain ditegaskan bahwa "Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan,"¹ bahwa "Sikap saling menghargai antara sesama manusia itu merupakan ujud daripada kemanusiaan yang adil dan beradab,"² bahwa sila itu "juga melahirkan sikap penghormatan dari bangsa kita kepada bangsa-bangsa lain,"³ bahwa "Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan"⁴ dalam arti bahwa "... tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan ini dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya."⁵ Memang manusia wajib ikut dalam pembangunan dan dalam rangka itu memeras otak dan mencurahkan tenaganya, tetapi ia tidak boleh diperlukan sebagai alat belaka atau semata-mata sebagai faktor produksi.

¹Sambutan pada peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Jakarta, 1 Juni 1967. Lihat Krissantono (ed.), *op. cit.*, hal. 39.

²Sambutan pada peringatan Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia, Jakarta, 15 Februari 1975. Lihat Krissantono (ed.), *ibid.*, hal. 39.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Sambutan pada peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung, 5 Desember 1974. Lihat Krissantono (ed.), *op. cit.*, hal. 41.

Semuanya itu dikukuhkan dalam Ketetapan No. II/MPR/1983 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai berikut. "Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku-keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepa selira," serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain."

Hak-hak Asasi Manusia: Hakikat dan Sejarah Perkembangannya

Sunarto NDARU MURSITO*

Dalam jaman ini semakin disadari bahwa manusia adalah makhluk yang khas, yang mempunyai *suatu keluhuran tertentu*. Kesadaran akan derajat manusia demikian ini terungkap dalam pengakuan bahwa *setiap manusia mempunyai hak-hak asasi*. Dari waktu ke waktu kesadaran hak-hak asasi manusia ini dirumuskan semakin jelas dan terperinci. Adapun keseluruhan hak-hak asasi tersebut perlu dibela dan dijamin perwujudannya demi menjunjung tinggi martabat manusia.

Perumusan hak-hak asasi manusia dewasa ini sesungguhnya merupakan suatu penemuan besar sejarah umat manusia atas keluhuran martabat kemanusiaannya sendiri. Sudah selayaknya hasil temuan yang mengidentifikasi citra kemanusiaan ini terus-menerus *semakin dijadikan kesadaran umum yang seluas-luasnya* (secara kuantitas) dan khususnya juga *semakin dipertajam serta diperdalam kekayaannya* (secara kualitas). Supaya dengan demikian, hak-hak asasi manusia perseorangan dan keseluruhan dapat lebih dihayati, dijadikan pegangan, dan ditegakkan pengamalannya.

Maka ulasan ini dimaksudkan demi turut meluaskan kesadaran umum masyarakat akan martabat kemanusiaannya sendiri dan juga mencoba meresapkannya ke dalam kebudayaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia yaitu Masyarakat Pancasila. Dari sebab itu pembahasan hak-hak asasi manusia ini akan mencakup: pertama, *hakikat* hak-hak asasi manusia; kedua, *sejarah perkembangan* hak-hak asasi manusia.

HAKIKAT HAK-HAK ASASI MANUSIA

Ciri-ciri dasariah manusia ialah bahwa manusia itu bersifat dinamis, merdeka, dan sosial. Manusia adalah *dinamis*, karena diri manusia mem-

*Staf CSIS.

punyai sifat *terus-menerus berkembang* menuju kesempurnaan dan kesejahteraan hidupnya. Sebagaimana sebutir biji padi yang secara alamiah harus berkembang terus-menerus hingga akhirnya menjadi tanaman padi yang lebat dengan bulir-bulir menguning yang siap dituai, begitu pula manusia secara kodratnya pun harus terus-menerus berkembang untuk *mencapai ideal kemanusiaannya*. Dalam hal ini manusia tercipta tidak sekali jadi, tetapi sebagai suatu potensi/bakat yang dari hari ke hari seharusnya berproses menjadi realisasi/kenyataan.

Untuk mencapai ideal kemanusiaannya itu, manusia dipercayakan bisa mandiri sebagai *pelaku yang aktif* atau *subyek*. Dengan demikian manusia bersifat merdeka atau bebas, artinya dia *dapat memilih* perbuatan dan kelakuan untuk tujuan mengejar kesempurnaan dan kesejahteraan hidupnya. Namun menurut kodratnya manusia ini pun bersifat sosial karena dia *hidup dalam kebersamaan* dengan orang lain, yaitu baru bisa mengembangkan dirinya mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan bersama dengan orang lain. Tidak ada seorang manusia pun mampu hidup dan berkembang secara sendirian saja. Maka, dapat tercapai atau tidak ideal kemanusiaan yakni kesempurnaan dan kesejahteraan itu akhirnya ditentukan oleh *subyektivitas orang yang bersangkutan dalam kerja sama* dengan orang-orang lain dalam lingkungan sosialnya.

Jadi manusia pada dasarnya merupakan subyek yang menuju kepada kesempurnaan dan kesejahteraan. Tidak ada kecualinya setiap orang merupakan subyek kesempurnaan dan kesejahteraan. Karena kesubyeikan ini, maka secara hakiki manusia adalah *nilai pada dirinya sendiri* atau juga disebut *tujuan untuk dirinya sendiri*. Dengan perkataan lain, manusia pada hakikatnya bukan merupakan tujuan untuk yang lain yaitu yang pantas *dipergunakan saja sebagai alat* untuk kepentingan pihak lain. Secara demikian tiap-tiap manusia adalah subyek untuk kesempurnaan dan kesejahteraan *akunya* dan bukan obyek untuk kesempurnaan dan kesejahteraan orang lain. Sebab semua manusia harkatnya adalah subyektivitas dan bukan obyektivitas, maka setiap manusia pun perlu dan harus dihormati dan diperlakukan sebagai subyek sedemikian sehingga dia benar-benar *bisa disempurnakan dan disejahterakan*.

Dalam kehidupan bersama sehari-hari bagaimanapun kita masing-masing pasti berbuat baik atau berbuat buruk terhadap sesama manusia dan inilah perbuatan moral. Perbuatan moral ini sedikit banyak dipikirkan dan dipilih secara bebas, entah itu perbuatan moral baik atau perbuatan moral buruk. Perbuatan moral baik adalah seperti berperilaku ramah kepada bawahan, memberi informasi yang benar/mendidik, membayar upah yang layak, membela nama baik seseorang; sedangkan perbuatan moral buruk adalah

seperti berlaku angkuh dan kikir terhadap orang miskin, menipu konsumen, melalaikan kewajiban, penahanan sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Justru dalam *perbuatan moral kecil ataupun besar* inilah seseorang memperlakukan sesamanya sebagai subyek atau obyek. Dalam perbuatan baik saya memperlakukan orang lain sekaligus juga diriku sebagai subyek yang disempurnakan dan disejahterakan, sebaliknya dalam perbuatan buruk saya memperlakukan orang lain sebagai obyek untuk kemajuan dan kesejahteraanku sendiri.

Ternyata dalam kehidupan bermasyarakat orang banyak sekali melakukan perbuatan buruk yang semakin jahat, yaitu mereka hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri, sehingga *mengorbankan sesama manusia* menjadi alat untuk kemajuan dan kesejahteraan diri sendiri. Hal demikian ini juga berlaku antara perorangan dan kelompok, atau antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Sebagai akibatnya, berlangsunglah kemarahan dan perlawanan, mau saling membalas dan mengalahkan, ketegangan dan permusuhan, persaingan licik dan sulit ada kerja sama untuk saling membina kesempurnaan dan kesejahteraan masing-masing. Oleh karena itu dirasakan perlunya ada *lembaga kekuasaan yaitu negara* yang berkuasa membangun tertib kemasyarakatan secara keseluruhan, sehingga organisasi kekuasaan ini efektif mencegah atau menyelesaikan berbagai perbuatan jahat di samping berkemampuan menyelenggarakan keadaan baik bagi warga masyarakat untuk *bekerja sama saling menyumbangkan kemampuannya* demi kemajuan dan kesejahteraan bersama yang setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Jadi merupakan tuntutan kodrat sosial manusia agar terselenggara kehidupan bernegara yang *mengorganisasi berbagai fungsi/peranan* untuk mengembangkan peradaban dan kesejahteraan umum masyarakatnya.

Dalam rangka membatasi dan mencegah perbuatan-perbuatan buruk dalam kehidupan bermasyarakat tidak cukuplah diajarkan pengertian dan anjuran moral. Untuk itu negara masih perlu menuangkan moralitas itu ke dalam *hukum positif*, sehingga negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk menindak pelanggarannya sebagai perbuatan jahat dan memaksakan agar tertib keteraturan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga agar kesempurnaan dan kesejahteraan setiap warga masyarakat dapat terselenggara, maka konsepsi mengenai *syarat-syarat untuk pengembangan peradaban dan kesejahteraan umum* tidak cukup hanya diajarkan secara moral tetapi masih perlu dituangkan dan ditegaskan dalam hukum positif. Kesemuanya ini terungkap dalam usaha para pemikir kenegaraan untuk *memaklumkan dan meng-undang-undang-kan* hak-hak asasi manusia. Maka hak-hak asasi manusia merupakan kesadaran manusia akan syarat-syarat serta upaya-upaya tertentu untuk mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan setiap dan seluruh manusia.

Untuk jaman sekarang berbagai syarat dan upaya yang menjamin kemajuan dan kesejahteraan setiap orang di seluruh dunia, sudah dimaklumkan oleh piagam hak-hak asasi PBB dalam *Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia* pada tanggal 10 Desember 1948. Namun pernyataan hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan PBB ini dapat dikatakan barulah merupakan *anjuran moral*, yang masih perlu dijadikan *hukum positif lebih konkrit* oleh masing-masing negara anggota PBB lengkap dengan sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggarannya. Selama pernyataan hak-hak asasi manusia masih berupa anjuran moral dan tanpa penerapan sampai sekonkrit-konkritnya serta sanksi tegas dalam hukum pelaksanaannya dalam kehidupan negara, hak-hak asasi yang dengan susah-payah digali dari sejarah umat manusia *akan tetap tinggal sebagai seruan tanpa daya*.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak asasi manusia memang merupakan *bawaan dari martabat hakiki manusia* yang diciptakan dengan ciri dasariah dinamis, merdeka, dan sosial. Amanat langsung demi perwujudan kemanusiaan ini adalah *perlindungan dan jaminan* hak-hak asasi setiap orang dalam lembaga sosial berdaulat; yang berkemampuan menyelenggarakan itu secara maksimal dan optimal, yaitu negara. Tanggung jawab negara dalam instansi-instansinya ialah untuk menyerukan maupun semakin memperjelas hak-hak asasi manusia sebagai pesan moral dan mengoperasionalkannya sebagai hukum positif hidup bermasyarakat. Namun akhirnya hukum (positif) negara *tidak akan ada artinya, jikalau tidak dilaksanakan* oleh warga negara. Dalam hal ini menjadi tugas pokok aparatur negara, terutama para pemimpinnya dan instansi penegak hukum, untuk menjadi *teladan dan penggerak* pembangunan negara hukum, sehingga setiap dan seluruh warga negara *dimudahkan dan didorong* untuk mewujudkan hak asasinya dan menghormati hak asasi warga yang lain ataupun saling melengkapi menyelenggarakan hak asasi bersama.

Disayangkan bila yang sering kali terjadi para pejabat aparatur negara dan instansi penegak hukum justru *banyak menyelewengkan* kepercayaan yang diamanatkan tuntutan hak-hak asasi kemanusiaan dari masyarakatnya. Sehubungan dengan ini budaya Nusantara telah mengumandangkan peringatan moral "pagar makan tanaman," yang pastilah kebijaksanaan ini diangkat dari pengalaman sosial di Nusantara. Apabila keadaan ini yang terjadi, maka kehidupan bernegara dijadikan negara kekuasaan dan bukan negara hukum. Jelaslah demi hak-hak asasi manusia keadaan demikian harus diperbaiki khususnya oleh pucuk-pucuk pimpinan pemerintahan dan instansi penegak hukum secara kepeloporan menegakkan hukum dengan membersihkan, memperbaiki, dan memantapkan aparatur penegak hukum untuk *berdaya membangun negara hukum betul-betul*. Jika tekad ini dijadikan gerakan nasional yang jujur niscaya akan disambut dan didukung oleh masyarakat bangsa yang merasa diperjuangkan hak-hak asasinya.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Dalam keadaan hak-haknya dilanggar, justru manusia lebih disadarkan akan hak-haknya itu sehingga terdorong untuk membelanya, dan bahkan dengan berbagai upaya dicoba untuk mencegahnya dari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kesadaran demikian ini ternyata *sudah dirumuskan sejak jaman purba*. Ini jelas diketemukan dalam Kode Hukum Raja Hammurabi dari Babilonia, yaitu dibuat 2100 tahun Sebelum Masehi, yang dalam mukadimahnyanya memperingatkan bahwa hukum ini diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam negeri, untuk memberantas yang jahat dan angkara murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah ('... to make justice appear in the land, to destroy the evil and the wicked, that the strong might not oppress the weak.')

Asas persamaan di muka hukum dan asas pengadilan bebas yang tidak memihak pun sebagai hak-hak asasi manusia yang menonjol dalam jaman kita ini *telah terdapat* dalam perintah Raja Thutmose dari Mesir kepada Ketua Mahkamah Agung Pekhmire dalam tahun 1500 Sebelum Masehi: "Sikap memihak merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Dewa. Ajaran ini yang harus dilaksanakan: engkau harus berbuat sama untuk semua orang. Hendaklah memandang orang yang kau kenal seperti orang yang tidak kau kenal, dan memperlakukan orang yang dekat dengan ... seperti orang yang jauh dari ..." Begitu pula asas *isogoria* (kebebasan berbicara) dan *isonomia* (persamaan di muka hukum) sudah ditegakkan di negara-negara kota Yunani Purba ratusan tahun Sebelum Masehi.²

Di samping itu *di sana-sini juga terdapat* negara-negara kerajaan yang meng-undang-undang-kan hukum yang menegakkan hak asasi manusia kendatipun tidak begitu sempurna, termasuk kerajaan di Nusantara ini seperti pemerintahan Ratu Syima di Kerajaan Mataram Hindu dalam abad VII Masehi. Apabila kita membaca *Kitab Suci* masing-masing agama atau *kebijaksanaan bangsa-bangsa* seperti terungkap dalam pepatah atau peribahasa-nya, maka akan terjumpai pula ajaran-ajaran yang melindungi berbagai hak asasi manusia.

Pada pokoknya pelanggaran hak-hak asasi manusia satu terhadap manusia lain berdasar atas *sikap mau memeralatkannya* untuk kemajuan dan kesejahteraan diri sendiri. Tidak dipedulikan bahwa hak asasi orang lain dikorbankan karenanya. Perbedaan kemampuan di antara sesama manusia tidak dimanfaatkan untuk saling melengkapi secara sederajat, tetapi di-

¹Lihat Richard W. Nice, ed., *Treasury of the Rule of Law*.

²Maurice Cranston, *Human Rights Today*, Manaktalas, Bombay 1966, hal. 9.

eksploitasi untuk keuntungan sepihak baik antara orang seorang, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Demikianlah sejarah umat manusia diwarnai oleh periode-periode kehidupan pihak penindas dan si tertindas, yang *menurut jamannya masing-masing* terdiri dari orang bebas dan budak, bangsawan dan rakyat jelata, tuan dan hamba, atau dengan istilah lebih halus atasan dan bawahan.

Sudah sejak *jaman Yunani kuno* mulai dari Plato (428-348 SM) dikaji corak kehidupan negara yang dapat menjamin peradaban dan kesejahteraan manusia, yang merupakan tujuan dasar hak asasi manusia. Tujuan ini menurut Plato hanya akan tercapai kalau negara dapat melaksanakan *ideologi keadilan*, yaitu setiap warga negara mendapatkan kedudukan atau tempat yang sesuai dengan kemampuannya dan dengan itu mereka masing-masing menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban atau tugasnya. Dengan kata lain, keadilan akan tercapai apabila dicapai keteraturan dalam masyarakat, di mana masing-masing dapat menghargai hak-hak orang lain. Plato menekankan peranan para filsuf, yang mengerti keadilan melebihi orang lain, memimpin pemerintahan yang siap untuk dilaksanakan oleh para pejabat aparat negara.

Kemudian menurut Aristoteles (384-322 SM) kriteria kebaikan negara ialah apakah negara *menguntungkan bagi seluruh masyarakat*, sebab negara yang hanya menguntungkan penguasa adalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdikan kepada masyarakat, menurut Aristoteles negara harus diatur baik dengan *konstitusi dan hukum yang menjamin* warga negara *bersama-sama mencapai* optimum kesejahteraan. Terselenggaranya negara hukum yang berusaha menegakkan hak asasi manusia itu khususnya berlangsung dalam negara-negara demokrasi Yunani dan Republik Romawi kuno.

Ajaran agama, filsafat, atau hukum kenegaraan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat dikatakan mengalami pasang-surutnya sejarah *manusia yang berambisi pada kekuasaan*. Sebab kekuasaan mudah menyediakan berbagai pemenuhan keinginan manusia, menjadi jelas mengapa sejarah sosial manusia pada umumnya diwarnai gelombang gila kekuasaan. Karena kekuasaan bertendensi kepada dominasi tanpa mau dikontrol, maka itulah berakibat kejahatan manusia sehingga mau menguasai dan memperlakukannya demi kepentingan penguasa. Kendatipun senantiasa dikumandangkan ajaran moral tentang kesamaan derajat manusia dan kewajiban cinta kasih antar sesama manusia, sepanjang abad sejarah tak habis-habisnya perkembangan masyarakat berlangsung dalam ketimpangan sosial dan bahkan secara struktural masyarakat dibagi atau dipisahkan antara orang dari kelas tinggi dan kelas rendah, antara kelompok lapisan atas dan lapisan bawah, antara

bangsa yang menang dan bangsa yang kalah/tunduk. Dalam kehidupan bermasyarakat masing-masing warga mementingkan hak-haknya sendiri sampai tidak saling menghormati hak-hak warga lainnya, bahkan justru menyerobot dan merampasnya. Orang, kelompok, bangsa yang cenderung semakin memperbesar hak-haknya sendiri itu mau tak mau menguasai dan mengeksploatasi hak-hak orang, kelompok, bangsa lain. Dengan sendirinya seluruh keadaan sosial ditentukan oleh keinginan dan kemauan sang penguasa dengan segala cara.

Sejarah umat manusia yang ditandai *ulah para penguasa besar maupun kecil*, yang memperoleh kekuasaan karena dipercaya atau karena merebutnya, pada umumnya mendudukkan diri sebagai penguasa masyarakat yang harus diabdikan dan dituruti pendapat atau perintahnya. Akhirnya pendapat atau perintah ini pun biasa dilembagakan sebagai peraturan atau hukum, yang pelanggaran-pelanggarannya akan dikenakan hukuman. Yang dijadikan peraturan atau hukum bukanlah hak asasi manusia melainkan *kepentingan penguasa*. Hal ini terjadi di mana-mana di muka bumi selama pemerintahan raja-raja, para diktator, masa kolonialisme bangsa-bangsa. Dan bahkan sudah dalam pemerintahan demokrasi jaman sekarang ini pun masih sering dijumpai. Dapat dikatakan bahwa dalam jaman perbudakan, jaman feodalisme dengan penggolongan kaum bangsawan dan rakyat jelata, jaman imperialisme dengan nafsu penjajahan bangsa lain, terjadilah manusia/kelompok/bangsa yang satu memperkosa hak-hak manusia/kelompok/bangsa yang lain sebagai penguasa terhadap hamba.

Dalam hal ini di kerajaan Inggris berlangsung tradisi perkembangan ke arah penghargaan hak asasi manusia. Pada tahun 1164 diakui *Constitution of Clarendon* ketika Raja Henry meminta *Great Council* (semacam Dewan Pertimbangan Agung) untuk bersidang merumuskan berbagai hal yang dianggap sebagai baik untuk kebiasaan dalam pemerintahan. Supaya kalau raja bertindak lain daripada yang telah ditetapkan akan mudah diketahui letak kesalahan raja.¹ Tetapi pada awal abad ke-12 Inggris berada di bawah Raja John yang memerintah dengan sewenang-wenang. Raja bisa *berbuat sesuka hatinya* baik terhadap kemerdekaan seseorang, wanita, maupun hak milik. Yang paling merasakan hal ini ialah kaum bangsawan yang meskipun mempunyai hak istimewa atau kekayaan, akan tetapi kalau sudah menghadapi raja, maka tidak berkuasa untuk mempertahankan apa yang dirasakan sebagai haknya. Karenanya Raja John dibenci oleh kebanyakan bangsawan. Pada tahun 1214 ketika Raja John mendapat kekalahan besar dalam perang dengan Raja Philip dari Perancis, para bangsawan merasa saat inilah kesempatan sebaik-baiknya untuk mengadakan aksi terhadap rajanya. Kaum bangsawan dan pimpinan

¹Dra. T.S. Yudana dan Sumanang SH, *Hak-hak Asasi Manusia* (PT Gunung Agung, Jakarta), tanpa tahun, hal. 12.

Gereja berikrar akan memberontak; apabila raja menolak tuntutan mereka. Raja yang tak berdaya merasa tiada jalan lain daripada berdamai dan menerima dokumen tuntutan mereka *Magna Charta* 15 Juni 1215.

Pada intinya *Magna Charta* memaksa raja untuk tidak melakukan pengambilan hasil bumi begitu saja tanpa persetujuan mereka, untuk tidak menuduh, menangkap, menahan, dan menuntut seseorang tanpa pengadilan yang dapat dipercaya, apabila orang telah ditahan atau dirampas miliknya akan segera mendapat ganti rugi/perbaikan.¹ Rumusan ini bertujuan membatasi tindakan sewenang-wenang dari raja. Kendatipun piagam ini tidak begitu berarti bagi penduduk secara umum, namun untuk masa itu sudah merupakan suatu kemajuan besar. Bukan dalam rumusan yang tidak tegas dan sangat feodal terletak arti dan pengaruhnya yang luas, tetapi dalam *interpretasi generasi selanjutnya* yaitu rakyat Inggris menafsirkannya bahwa hak raja bukanlah tak terbatas atau absolut melainkan harus memperhatikan hak-hak rakyat yang tak boleh dilanggarnya. *Magna Charta* ini mulai mengembangkan tradisi bahwa *hukum adalah lebih tinggi daripada raja*.

Dalam abad ini juga filsuf Thomas Aquinas (1225-1274) menekankan peranan hukum bagi kehidupan bernegara, sebab hanya secara negara hukum manusia dapat *hidup sungguh-sungguh manusiawi dalam masyarakat*. Menurut Thomas tugas pokok negara ialah melalui hukum menciptakan masyarakat yang adil, aman dan damai. Ditegaskannya bahwa tujuan negara dibawahkan kepada tujuan masing-masing warganya yaitu *kebahagiaan di dunia dan akherat*, sebab setiap individu manusia dalam dirinya mempunyai nilai mutlak. Oleh karena itu, negara selalu harus bertindak sesuai dengan *hukum kodrat manusia*, sehingga semua hukum positif buatan negara harus mengkonkritkan hukum kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakan negara yang bertentangan dengan hukum kodrat tidak lagi wajib ditaati oleh warga negara. Dan apabila penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri atau melanggar kewajibannya terhadap rakyat, maka rakyat *berhak untuk memecatnya*.

Bagaimanapun pembangunan negara hukum pastilah membutuhkan *negara dan negarawan yang kuat*, sebab apabila tidak demikian, niscaya *tak akan berdaya mengatasi* pelanggaran atau pembangkangan terhadap tertib hukum. Hal semacam inilah yang justru banyak terjadi menjelang Jaman Modern. Ketika itu keadaan berbagai negara dirasakan lemah yang *akibatnya di mana-mana terdapat* kerusakan, kekacauan, kekosongan hukum, korupsi, tiada kedisiplinan, kejahatan moral, perpecahan dalam agama Kristen dan perang agama, oportunisme, intrik dan permusuhan, perpecahan nasional, dan lain-lain. Situasi ini memunculkan filsuf-filsuf yang mencita-citakan ke-

¹*Ibidem.*, hal. 8-12.

sejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan cara *kekerasan, keberanian, dan kekuatan pemerintahan*. Menonjol di antaranya ialah filsafat politik Machiavelli di Italia, Bodin di Perancis, dan Hobbes di Inggris. Kemasyrakatan yang sudah begitu mengecewakan dan menjengkelkan menyebabkan mereka menyimpulkan cara pemecahan lebih daripada biasa, yang dinilai terlalu ekstrim dan berat sebelah dari kacamata yang kurang mengerti konteks situasinya.

Niccolo Machiavelli (1469-1527) mencita-citakan negara yang sehat, kuat, tidak korup di mana ada keberanian, kebanggaan, keamanan, sikap tak mau mengalah, kedisiplinan militer pada warga negara. Untuk itu Machiavelli menekankan bahwa penguasa hanya boleh mengenal satu tujuan ialah mempertahankan dan menambah kekuasaannya. Demi tujuan ini berdasarkan kondisi Italia saat itu disimpulkannya, bahwa segala cara apa pun boleh. Dipandanginya despotisme *hanya diperlukan untuk* proses menciptakan suatu negara dan memperbaiki suatu negara yang korup. Tetapi jika negara sudah dalam keadaan beres, menurut Machiavelli *harus ada partisipasi rakyat* seperti dalam Republik Romawi kuno dan kekuasaan dijalankan *sesuai dengan hukum* yang menjamin hak milik dan hak lain warga negara.

Dalam pengamatan Jean Bodin (1530-1596) kekuasaan adalah sama sekali berada di atas hukum, sehingga kedaulatan adalah norma tertinggi atas warga negara dan tidak terbatas oleh suatu hukum; karena *kekuasaan itu sendiri merupakan sumber hukum dan konstitusi*. Maka Bodin mengemukakan bahwa tanpa perlu minta persetujuan siapa pun, kedaulatan dapat memberi hukum kepada warga negara bersama-sama atau masing-masing. Semua organisasi sosial di dalam negara hanya mempunyai kewenangannya karena disetujui oleh negara.

Menurut pandangan Thomas Hobbes (1588-1679) manusia itu hidup untuk dirinya sendiri-sendiri, saling mencurigai dan memusuhi. Manusia terhadap manusia lain *bagaikan srigala* (homo homini lupus). Masing-masing merasa terancam. Namun manusia ingin hidup dalam ketentraman, keteraturan, dan perdamaian, sebab itu kekacauan harus diakhiri. Untuk itu perlu diciptakan *negara yang terhadapnya semua harus tunduk*. Karena semua baru tunduk kepada apa yang ditakuti, maka negara harus diberi *kekuasaan tak terbatas* di mana individu-individu menyerahkan semua hak-haknya kepada negara. Kemutlakan kekuasaan negara inilah harga yang harus dibayar supaya setiap orang tunduk kepada peraturan-peraturan negara. Hobbes menegaskan bahwa negara diadakan untuk melindungi individu dari penindasan dan ancaman atas hak hidupnya, maka negara tak usah ditaati dan *berakhirlah negara* jika negara tidak lagi menjalankan fungsinya ini.

Pemikiran Machiavelli, Bodin, dan Hobbes itu sangat berarti dalam mendorong perkembangan negara teritorial di Eropa pada abad ke-17, di mana kekuasaan raja yang semula dibatasi oleh hak-hak kaum bangsawan dan gereja berubah menjadi *otoritas menyeluruh* sebagai monarki absolut. Selama Abad Pertengahan masyarakat di Eropa diatur menurut suatu sistem hak-hak yang diimbangi oleh kewajiban-kewajiban yang sesuai. Raja yang mula-mula dipilih dari antara para pangeran mempunyai hak-hak tertentu, sedangkan golongan-golongan dalam masyarakat mempunyai hak-hak tertentu juga yang *harus dihormati oleh raja*, seperti hak-hak para pangeran dan bangsawan, kota-kota bebas, gereja, dan rakyat biasa. Dengan perkembangan negara teritorial itu kekuasaan raja yang personal berkembang menuju *otoritas negara sebagai kekuatan mutlak*.¹ Perkembangan ini dapat tercermin dari ucapan Raja Louis XIV (1643-1715): "L'Etat, c'est moi" (Negara adalah saya)!

Karena merasakan nikmat menjalankan kekuasaan, sudah tentu para penguasa mudah sekali didorong untuk meningkatkan kekuasaannya setinggi-tingginya. Sekaligus dengan ini diusahakan konsolidasi untuk memperkuat dan memantapkan kekuasaan yang didudukinya. Ambisi kekuasaan dan keinginan memuaskan nikmat duniawi yang menyertainya cenderung membuat para penguasa menjalankan kekuasaannya secara serakah dan sewenang-wenang. Sebagai akibatnya, para penguasa *memerintah negaranya sebagai tiran* dan ini menyebabkan penguasa bawahannya pun menjadi tiran pula, sehingga masyarakat diperintahi oleh *tiran-tiran besar kecil yang berperilaku lalim*. Kondisi tirani ternyata menimbulkan kekerasan atau bahkan keganasan sosial seperti perebutan kuasa, peperangan, penjajahan, pemberontakan, pembasmian, penindasan, penghisapan, perampokan antar manusia, kelompok, dan bangsa. Patut diketahui bahwa dalam abad ke-17 itu bangsa Eropa tampil sebagai penjajah di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini pastilah *rakyat jelata pada umumnya menjadi korban* kesewenang-wenangan, diperas, diteror, dan diinjak-injak hak-hak asasinya untuk kepentingan para penguasa.

Menghadapi kemalangan dan belenggu sosial demikian itulah dikembangkan konsepsi tentang hak-hak asasi individu yang tak boleh diganggu gugat di Eropa dan Amerika Utara di mana dalam abad ke-17 dan 18 berpengaruh luas *aliran filsafat Aufklaerung* dengan tokoh-tokohnya John Locke di Inggris, Voltaire dan Rousseau di Perancis, Emmanuel Kant di Jerman, Benyamin Franklin dan Thomas Jefferson di Amerika Utara. Aliran Aufklaerung ini sangat menekankan peranan akal-budi untuk mencerahkan (= aufklaeren) kehidupan manusia. Berdasarkan penalaran akal-budi maka menurut Aufklaerung semua manusia pada hakikatnya diciptakan merdeka dan sama

¹Dr. Franz Magnis Suseno, *Beberapa Masalah Etika Kemasyarakatan* (STF Driyarkara, Jakarta, 1976), hal. 12.

derajatnya. Tetapi dalam kenyataan masyarakat justru yang terdapat adalah di mana-mana kebebasan terbelenggu dan prinsip kesederajatan manusia diingkari, hal itu *bertentangan dengan hak kodrati manusia*. Ini berarti bahwa kemasyarakatan tersebut merupakan formasi sosial yang keliru, salah, dan bahkan jahat, karena itu masyarakat manusia *harus dikembalikan kepada keadaan kodratnya* yakni keadaan merdeka dan kesamaan.

Dalam hal ini negara Inggris memelopori pengakuan hak asasi manusia tersebut. Pada tahun 1628 dikeluarkan *Petition of Rights* yaitu dalam badan perwakilan diajukan berbagai pertanyaan mengenai *hak-hak rakyat beserta jaminannya* kepada raja yang akan menjawabnya di hadapan sidang badan perwakilan pula. Dari pertanyaan dan jawaban ini *didapat penegasan* mengenai hak-hak yang sebelumnya tak ada ketentuan sama sekali. Dari sini-lah hak-hak rakyat yang harus dihormati oleh para pemegang kekuasaan sedikit demi sedikit *menjadi semakin luas*. Khususnya dalam tahun 1670 ditetapkan *Habeas Corpus Act* yaitu surat perintah raja agar setiap orang yang ditahan *segera dihadapkan ke muka hakim* (paling lama tiga hari) dan diberitahu tuduhan atasnya ia ditahan.¹ Ini berarti bahwa hak asasi kemerdekaan perorangan menjadi lebih nyata, karena ketika itu cukup biasa orang ditangkap dan ditahan secara tidak adil. Dari sinilah berasal prinsip hukum penting agar orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.

Filsafat politik John Locke (1632-1707) memandang negara menerima kedaulatannya *dari warga negara* dengan tujuan untuk menjamin agar *setiap warga negara tidak saling melanggar hak-haknya*. Negara bertugas menyelenggarakan keteraturan dan ketentraman umum. Supaya para penyelenggara negara melaksanakan tugasnya dan justru tidak melanggar hak-hak warga negara, maka negara harus dikontrol secara ketat. Pembangunan keteraturan dan ketentraman maupun penegakan hak-hak warga negara ini dituangkan dalam undang-undang yang *dihasilkan oleh Parlemen* dan kemudian *harus dilaksanakan oleh Raja*. Karenanya jika penyelenggara negara melanggar perundang-undangan, ia akan kehilangan haknya atas ketaatan warga negara dan warga negara berhak untuk menentangnya.

Dengan demikian John Locke dipandang sebagai teoretikus monarki konstitusional dan pemikirannya sangat mempengaruhi proses revolusi politik di Inggris dari *kedaulatan raja* menjadi *kedaulatan rakyat*. Apabila sebelumnya kedudukan Parlemen hanya sebagai dewan penasihat saja, maka sesudah ini berperan sebagai pemegang kedaulatan rakyat yaitu menentukan kebijaksanaan negara yang dikehendaki rakyat. Tegaknya demokrasi di Inggris ini adalah kemenangan perjuangan golongan anti-raja dalam *The Glorious Revolution* tahun 1688 di mana Raja Stuart James II yang makin sewenang-

¹Dra. T.S. Yudana dan Sumanang SH, *op. cit.*, hal. 12-13.

wenang digulingkan dan digantikan oleh William dari Oranye yang menjadi *Raja Konstitusional*. Kepada Raja William yang baru diminta menjadi raja dipaksakan hak-hak Parlemen terhadap Pemerintah yaitu *Bill of Rights* tahun 1689: Raja harus memerintah negara sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen. Sekaligus beberapa hak individu diakui seperti hak untuk mengajukan petisi, hak untuk berdebat bebas dalam Parlemen, dan larangan terhadap hukuman yang berlebih-lebihan.

Aliran Aufklaerung terutama berkembang di Perancis dengan pemikirnya yang terkemuka: Charles de Montesquieu (1689-1755), Francois Arouet de Voltaire (1694-1778), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Dalam *kemasyarakatan feodal* di daratan Eropa mereka menekankan aspek kesamaan manusia, sebab pada saat kelahirannya semua manusia menurut kodratnya *mempunyai potensialitas yang sama*. Sesudah itu keadaan manusia selanjutnya tergantung pada keadaan mereka yang bermacam-macam, sehingga satu sama lain berkembang secara berlainan. Ketidaksamaan sosial yang ada sekarang dinilai akibat jalan hidup orang dan perkembangan masyarakat *yang tidak sewajarnya*, di mana keserakahan merajalela, orang saling menghisap, dan orang ingin meninggikan diri terhadap yang lain. Apalagi dalam masyarakat tirani yang penuh kesewenang-wenangan sungguh masyarakat mencapai kebobrokannya di mana orang-orang yang adalah subyek dijadikan budak-budak, kebebasan dan kesederajatan manusia tiada lagi. Maka dicita-citakan pembangunan *negara demokrasi yang menyelenggarakan* hak kebebasan, kesamaan, keamanan, dan keadilan sosial. Montesquieu menekankan perombakan monarki absolut menjadi monarki konstitusional di mana dipisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Pembagian tiga kekuasaan ini secara konsekuen* dikatakannya akan menjamin keseimbangan antara tiga kekuasaan, sehingga kesewenang-wenangan bisa dicegah dan rakyat dapat memperdengarkan suaranya. Secara demikian dapat terwujudlah kebebasan warga negara sebesar mungkin dan terbina semangat hukum.

Emmanuel Kant (1724-1804) berpandangan bahwa semua manusia harus diperlakukan sebagai *tujuan-tujuan* dan bukan melulu sebagai alat-alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai *tujuan dalam dirinya sendiri*. Oleh karena itu, setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang menurut kehendak perorangan. Apabila seseorang memperalatkan sesama manusia, maka ini berarti *pelanggaran terhadap hak kemanusiaannya* yang adalah tujuan untuk dirinya sendiri. Menurut Kant setiap manusia adalah anggota yang aktif dari suatu kerajaan tujuan-tujuan (*ein Reich der Zwecke*), karena semua manusia sama-sama mampu mewujudkan kehendak yang baik.

Pemikiran Aufklaerung dari Eropa itu pun berkembang ke Amerika Utara, yang dalam abad ke-18 *kolonialisme Inggris* menunjukkan penjajahan

yang *semakin menindas*. Orang-orang Amerika merasa pemerintahan kolonial Inggris makin sewenang-wenang dan mengeksploitasi negeri mereka untuk kepentingan Inggris tanpa imbalan bagi kepentingan hak-hak mereka sebagai warga negara Amerika. Eksploitasi oleh kerajaan Inggris dan penentangan dari penduduk Amerika makin memuncak menjadi Revolusi Amerika tahun 1776 sebagai perjuangan suatu bangsa jajahan menggulingkan *pemerintah kolonial mereka* demi mendirikan bangsa baru dalam *pemerintah nasional demokratis* sebagaimana diajarkan Aufklaerung. *Declaration of Independence* yang dimaklukkannya menyerukan, bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan sederajat dan dianugerahi hak-hak asasi yang tak mungkin di-tiadakan, di antaranya hak hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini menegaskan bahwa pemerintahan pada hakikatnya didirikan *dari kuasa rakyat* dan fungsinya adalah *untuk menjamin ditegakkannya hak asasinya itu*. Maka jika pemerintahan justru memperkosa hak asasi warga negaranya, adalah menjadi hak asasi seluruh warga negara untuk *meruntuhkannya* demi mendirikan *pemerintahan baru yang benar-benar menegakkan hak asasi kemanusiaan mereka*.

Berdirinya kedaulatan rakyat di Inggris dan asas pemerintahan menyelenggarakan hak asasi manusia di Amerika itu mempunyai pengaruh besar atas meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis pada dasarnya adalah gerakan kemasyarakatan luas merombak *tata masyarakat feodal*, yang mengorbankan hak asasi rakyat umum demi kepentingan lapisan bangsawan. Revolusi ini mencetuskan deklarasi besar tentang hak asasi manusia dalam *Declaration des droits de l'home et du citoyen*. Deklarasi menandakan bahwa "ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau peremehan hak asasi manusia adalah sebagai satu-satunya sebab dari kemalangan masyarakat dan kebobrokan pemerintahan." Maka Revolusi Perancis merasa terpanggil untuk menyerukan *deklarasi nasional resmi* perihal *hak-hak asasi manusia dan warga negara* (17 pasal), dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia secara meluas disadari, dihormati, dan ditegakkan khususnya di negeri Perancis.

Revolusi demokrasi di Inggris yang mendirikan monarki konstitusional, Revolusi Amerika yang menumbangkan kolonialisme, dan Revolui Perancis yang menjebol feodalisme, yang kesemuanya menjunjung tinggi dan mengkodifikasikan (mengundang-undangkan) hak-hak asasi manusia serta membahakannya ternyata menghimbau masyarakat dunia sebagai *pernyataan kritik* terhadap sistem pemerintahan feodal dan kolonial, sekaligus *menyadarkan bangsa-bangsa lain* akan hak-hak asasi mereka yang diperkosa sewenang-wenang oleh pemerintah mereka yang feodal atau kolonial. Revolusi hak asasi itu inspirasinya *terus-menerus membangkitkan* pergerakan sosial dan nasional demokrasi bangsa-bangsa pada abad ke-19 di Benua Eropa dan Amerika, lalu pada abad ke-20 di Benua Asia dan Afrika. Kemudian dekla-

rasi-deklarasinya yang mengangkat prinsip-prinsip luhur tentang martabat manusia berhasil meyakinkan bangsa-bangsa, sehingga ketika mendirikan negara nasionalnya yang baru *tidak lupa mencantumkan* hak-hak asasi manusia dalam *Konstitusi/Undang-undang Dasar mereka*.

Kendatipun tata pemerintahan feodal dan kolonial telah berhasil dirobohkan dan dibentuk pemerintahan demokrasi nasional, semangat penghisapan feodal dan kolonial ternyata *beralih menjangkiti* para penguasa politik atau ekonomi yang baru di negara nasional yang bernama demokrasi itu. Penguasa-penguasa besar maupun kecil dengan egoisme tak terkendali tetap bernafsu memantapkan dan memperbesar kekuasaannya, sehingga kehidupannya terisi keserakahan, kesewenang-wenangan, dan kejahatan. Para penguasa ini pun *melestarikan ketidakadilan sosial dan meneruskan menginjak-injak hak-hak asasi* rakyat yang terbelakang dan lemah ekonominya, entah pada bangsanya sendiri atau pada bangsa lain yang dijajahnya. Puncak ketidakadilan sosial dan perkosaan hak asasi manusia ini adalah *mengganasnya Perang Dunia I dan II* dalam abad ke-20 yang membawa kehancuran lebih dahsyat.

Di atas reruntuhan Perang Dunia II yang tak mempedulikan hak asasi manusia dan merendahkan harkat manusia ini seruan hak-hak asasi manusia yang tetap membahana meyakinkan kaum intelek bangsa-bangsa akan sangat penting dan mendesaknya *segera menyadarkan dan menegakkan* hak asasi manusia di muka bumi ini *secara internasional*. Oleh karena itu ketika diusulkan untuk memaklumkan *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, sebagian besar negara anggota PBB menyetujui yaitu tepatnya 48 negara dan 8 negara menyatakan absen (Afrika Selatan, Arab Saudi, Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia). Piagam resmi hak-hak asasi manusia dari PBB yang berisi 30 pasal ini *merangku keseluruhan hak-hak asasi manusia* yang dikembangkan oleh berbagai bangsa sampai saat ini.

Kebijakan Internasional Hak-hak Asasi Manusia

Bantarto BANDORO*

Perkembangan internasional di bidang kemanusiaan setelah Perang Dunia II diwarnai dengan lahirnya persetujuan-persetujuan internasional yang mengatur masalah hak-hak asasi manusia. Internasionalisasi masalah hak-hak asasi manusia melalui persetujuan-persetujuan internasional ini menggeser pertimbangan yurisdiksi domestik yang sering digunakan oleh beberapa negara sebagai senjata untuk mencegah agar negara lain tidak mencampuri urusan hak-hak asasi negaranya. Dalam hubungan ini perlu dicatat juga pernyataan Carter di muka PBB pada tahun 1977, yaitu "Negara-negara anggota PBB tidak dapat menuntut perlakuan sewenang-wenang terhadap warganya sebagai urusan dalam negerinya."¹

Sementara itu, PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah-masalah internasional, juga tidak dapat begitu saja mengabaikan masalah hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu di dalam Piagamnya, PBB mempunyai komitmen untuk memajukan dan menghormati hak-hak asasi manusia secara universal tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Selain itu, negara-negara anggota PBB secara individu terikat untuk mengambil tindakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bekerjasama dengan PBB untuk mencapai tujuan tadi.² Sesuai dengan komitmen ini Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menerima Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang mencantumkan hak-hak dasar dan kebebasan fundamental manusia.³

*Staf CSIS.

¹Robert G. Johansen, "Human Rights in the 1980s: Revolutionary Growth or Unanticipated Erosion?" *World Politics*, Vol. 35, No. 2 (Januari 1983), hal. 291.

²Pembukaan Piagam PBB, pasal 1, 13 (1b), 55c, 62 (2) dan 68 Piagam PBB dalam Ian Brownlie, *Basic Documents in International Law* (London: Oxford University Press, 1972), hal. 4-31.

³Hak-hak dasar ini tercantum dalam pasal 3, 5, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 25, 26 dan 28.

Deklarasi ini diterima dengan perbandingan suara: 48 mendukung, 8 abstein dan tiada satu negara pun yang menentang. Negara-negara yang mengambil sikap abstein adalah: Beylorussia SSR, Cekoslovakia, Polandia, Saudi Arabia, Ukraina SSR, Uni Soviet, Persatuan Afrika Selatan dan Yugoslavia.

Walaupun deklarasi ini bukan merupakan instrumen yang mengikat, beberapa ketentuannya diakui sebagai prinsip-prinsip umum hukum¹ dan selain mencerminkan pertimbangan-pertimbangan dasar kemanusiaan, juga mempunyai pengaruh hukum tidak langsung dan dianggap oleh Majelis Umum dan para ahli hukum sebagai bagian dari hukum PBB. Yang lebih penting lagi adalah bahwa deklarasi ini mempunyai status sebagai petunjuk yang berwenang bagi Piagam PBB. Deklarasi universal itu kemudian diakui sebagai dasar lahirnya persetujuan-persetujuan internasional hak-hak asasi manusia baik dalam tingkat regional maupun internasional.

PROTEKSI INTERNASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

Asal-usul, dasar filosofis, dan cara merumuskan hak-hak asasi manusia adalah beberapa masalah dasar hak asasi yang selalu diperdebatkan. Dalam arti apakah hak-hak itu merupakan hak moral, atau hukum dan apakah hak-hak itu harus dibatasi pada kehidupan sipil dan politik atautkah juga termasuk dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sampai pertengahan tahun 1940-an tiada konsensus mengenai masalah-masalah itu. Sebagai akibatnya usaha-usaha untuk merumuskan atau melukiskan hak-hak itu sangat bergantung pada rumusan dan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Sejak diterimanya Deklarasi Universal itu pada tahun 1948 telah lahir beberapa konvensi regional maupun internasional, antara lain: (1) The European Convention on Human Rights (1950); (2) Convention Relating to the Status of Refugees (1951); (3) Convention on the Political Rights of Women (1953); (4) Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954); (5) Convention Concerning the Abolition of Forced Labour (1957); (6) Declaration of the Conference of Independent African States (1958); (7) Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958); (8) Declaration of the Rights of the Child (1959); (9) Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (1960); (10) Convention Against Discrimination in Education (1960); (11) Employment Policy Convention (1964); (12) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966); (13) International Covenant on Civil and Political Rights (1966); (14) Inter-

¹Pasal 28 Statuta Mahkamah Internasional.

national Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966); (15) American Convention on Human Rights (1969); dan (16) Final Act of Helsinki (1975).¹

Dari sejumlah dokumen hak-hak asasi yang diterima, tiga di antaranya sejauh ini menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, bukan saja karena dianggap sebagai aspirasi umum umat manusia yang mencakup berbagai segi kehidupan tetapi juga dianggap sebagai komitmen moral dan politik yang diharapkan bisa mengurangi ketegangan hubungan politik. Ketiga dokumen internasional itu adalah: (1) kovenan mengenai hak-hak sosial, ekonomi dan kebudayaan; (2) kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik; dan (3) Akta Final Helsinki. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa dokumen-dokumen lainnya tidak penting. Dilihat secara keseluruhan dokumen-dokumen internasional itu sesungguhnya merupakan langkah penting masyarakat internasional dalam dasawarsa terakhir untuk membentuk sistem internasional perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dua kovenan internasional mengenai hak-hak sosial, ekonomi dan kebudayaan dan hak-hak sipil dan politik adalah hasil-hasil terpenting yang dicapai oleh PBB di bidang kemanusiaan dan merupakan kodifikasi hak-hak asasi manusia yang mempunyai kekuatan mengikat internasional. Sampai tahun 1972 baru delapan negara yang meratifikasi kedua kovenan internasional ini dan jumlah ini tidak cukup untuk memberlakukan kedua kovenan itu secara efektif. Yang diperlukan adalah ratifikasi 35 negara atau lebih. Salah satu alasan mengapa jumlah negara yang mau meratifikasi kovenan saat itu sedikit adalah bahwa walaupun negara-negara anggota PBB bersedia menerima formula kompromi akomodasi sistem politik dan sosio-ekonomi yang berbeda, mereka enggan untuk menyesuaikan sistem domestik mereka dengan hak-hak yang tercantum dalam kovenan. Keengganan ini juga timbul sebagai akibat lemahnya prosedur pengawasan internasional.² Masyarakat internasional mulai menyadari arti penting ratifikasi kedua kovenan itu pada pertengahan tahun 1970-an ketika sekitar 27 negara lainnya mengambil keputusan untuk meratifikasi kedua dokumen itu. Dengan demikian kedua kovenan internasional itu mulai berlaku secara efektif sejak tahun 1977.

Sesuai dengan statusnya sebagai bagian dari International Bill of Rights³ kedua kovenan itu bukan saja dianggap mencerminkan solidaritas kemanu-

¹Brownlie, Basic Documents.

²Leo Gross, "The Development of International Law Through the United Nations," dalam *The United Nations Past, Present and Future*, ed. James Barros (New York: The Free Press, 1972), hal. 196.

³Kerangka International Bill of Rights ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Truman pada sidang penutupan Konperensi PBB mengenai Organisasi Internasional di San Francisco, dan terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kedua kovenan internasional 1966.

siaan internasional dan menekankan aspek kehidupan non-politik tetapi juga mencerminkan pengakuan bahwa politik dan sistem politik yang ada harus menguntungkan manusia sebagai individu dan bukan sebaliknya. Sifat komprehensivitas kedua dokumen hak asasi manusia ini selain menunjukkan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial berkaitan erat dengan hak-hak sipil dan politik juga menunjukkan hubungan erat antara realisasi hak-hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan dikeluarkannya kedua kovenan internasional itu dan perkembangan masyarakat internasional muncul suatu kebutuhan untuk menjabarkan konsepsi, prinsip dan standar hak-hak asasi manusia. Kebutuhan serupa ini dirumuskan secara komprehensif dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 32/130 tahun 1977¹ dan merupakan refleksi hubungan antara Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Resolusi ini, yang 'oleh sementara pengamat masalah hak asasi manusia dianggap sebagai "paket berimbang" hak asasi manusia, tidak dimaksudkan untuk mengubah Piagam PBB, deklarasi universal maupun kovenan internasional 1966, tetapi suatu pemaparan hak-hak asasi manusia lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat internasional. Resolusi ini juga tidak dimaksud sebagai kata terakhir proses pengembangan konsepsi hak asasi manusia dalam kerangka PBB. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan fundamental manusia dan oleh sebab itu proses pengembangan konsepsinya akan berjalan terus.

Di forum PBB berkembang suatu pendekatan blok terhadap masalah hak asasi ini. Negara-negara dari Blok Barat, misalnya, mendesak agar PBB mengambil langkah konkrit yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil dan politik sebagai satu-satunya aspek penting hak asasi manusia. Motivasi sikap negara-negara Barat ini adalah kepentingan kekuatan yang berkuasa di negara-negara itu sesuai dengan kebijakan dasar hak asasinya yang lebih mengutamakan realisasi dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Dengan sikap serupa itu kelihatannya mereka berusaha memaksakan tekanan sistem politiknya terhadap negara-negara lain yang mempunyai sistem politik yang berbeda dan melindungi dalil dasar sistem kapitalis terhadap kemungkinan meningkatnya penetrasi gagasan-gagasan sosialis di dunia, misalnya yang menyangkut pemilikan perorangan dan pluralisme politik dalam masyarakat.

Selain itu, beberapa negara Barat mengkritik negara-negara Non-Blok dan negara berkembang lainnya mengesampingkan prinsip-prinsip klasik hak asasi

¹Mengenai inti resolusi ini lihat lebih lanjut Jack Donnely, "Recent Trends in U.N. Human Rights Activity: Description and Polemic," *International Organization*, Vol. 35, No. 4 (1981), hal. 641-642.

manusia dan meragukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara-negara Non-Blok dan berkembang lainnya tidak dapat menerima tuduhan serupa itu. Mereka berpendapat bahwa mereka menerima nilai-nilai penting semua dokumen hak asasi manusia tetapi tidak cukup puas hanya dengan nilai-nilai itu. Oleh sebab itu mereka berusaha menjabarkan nilai-nilai itu lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masyarakat internasional yang lebih luas; dan hasilnya adalah seperti tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 32/130.¹

Sementara itu, negara-negara Blok Timur (Uni Soviet) mengambil sikap yang lebih ekstrem. Mereka mengesampingkan "hak-hak asasi manusia individu" dan sebaliknya menekankan kebebasan dan "hak-hak asasi kolektif." Mereka juga berusaha mengalihkan kegiatan-kegiatan PBB ke arah penyelesaian pelanggaran hak asasi secara massal khususnya sebagai akibat pelaksanaan kebijakan rasisme, kolonialisme dan imperialisme.² Tetapi kendati pendekatan blok terhadap masalah hak asasi manusia itu, kedua kovenan yang disebutkan di atas diterima dan diratifikasi oleh negara-negara sosialis maupun kapitalis.³

Masalah hak asasi manusia di Eropa dipersoalkan secara serius pada tahun 1940-an sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam masa setelah Perang Dunia II. Aksi Hitler merupakan faktor menentukan kegiatan internasional hak asasi manusia di kawasan itu. Perhatian masyarakat Eropa terhadap hak asasi manusia semakin kuat ketika mereka sepakat untuk membentuk Dewan Eropa tahun 1948 dan menentukan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai syarat utama keanggotaan Dewan. Sejalan dengan usaha-usaha untuk menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia ini masyarakat Eropa juga membentuk jaminan internasional hak asasi manusia dalam bentuk konvensi perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental. Konvensi ini kemudian dikenal dengan nama Konvensi Eropa 1950. Dalam rangka pelaksanaannya dibentuk Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Eropa.

Masalah hak asasi manusia kembali menjadi perhatian masyarakat Eropa dalam Konperensi mengenai Keamanan dan Kerja Sama Eropa di Helsinki tahun 1975. Negara-negara Eropa termasuk negara netral di kawasan itu mencapai kata sepakat mengenai mekanisme untuk memelihara keamanan dan

¹D. Marinic, "The United Nations and the Protection and Advancement of Human Rights," *Review of International Affairs*, No. 721 (1980), hal. 110.

²*Ibid.*

³Asbjorn Eide, "Human Rights and Non-Intervention in the All-European System," *Bulletin of Peace Proposal*, Vol. 8, No. 3 (1977), hal. 210.

kerja sama di kawasan. Kesepakatan ini dirumuskan, dalam suatu akta yang kemudian dikenal dengan Akta Final Helsinki 1975. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, bagian terpenting dari Akta ini adalah Prinsip VII yang secara langsung menyinggung masalah hak asasi dan kebebasan fundamental manusia. Selain itu Akta Final ini memuat unsur-unsur dinamis bagi pembangunan sistem Eropa di masa depan tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi tetapi juga dalam implementasi hak-hak asasi manusia. Jelas bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam perdebatan politik di Eropa.

Dilihat dari perspektif itu persoalan hak asasi manusia dalam konteks Eropa lebih banyak dilihat sebagai bagian dari proses detente antara Timur dan Barat yang bergantung tidak hanya pada hubungan antar negara dan sikap yang diambilnya tetapi juga pada pengakuan dan implementasi internasional hak asasi manusia. Kedua unsur itu sejauh ini dianggap sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan dan kerja sama timbal-balik antara negara-negara di kawasan Eropa.

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa aplikasi kebijakan internasional hak asasi manusia secara memuaskan bukan saja sangat bergantung pada persamaan persepsi negara-negara di dunia mengenai konsepsi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tetapi juga bergantung pada keselarasan antara kebijakan nasional dan kebijakan internasional hak asasi manusia. Dilihat dari perspektif ini kebijakan hak asasi manusia tidak boleh dilaksanakan atas dasar pertimbangan ideologi, tetapi secara pragmatis demi kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Hal itu bisa dilakukan dalam kerangka hubungan bilateral maupun organisasi-organisasi multilateral.

ASPEK-ASPEK IMPLEMENTASI

Pengalaman selama tiga dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa PBB merupakan forum internasional utama untuk menangani masalah hak asasi manusia. Hal ini antara lain terlihat dari diterimanya sekitar 20 dokumen internasional dalam kerangka PBB di bidang hak asasi manusia. Di antara dokumen-dokumen itu dua konvensi internasional 1966²sejauh ini merupakan dokumen hak asasi manusia yang paling banyak mendapat sorotan bukan saja karena mencakup hak-hak dalam berbagai segi kehidupan manusia tetapi juga merupakan dasar proteksi internasional hak asasi manusia secara keseluruhan.

Pada tahun 1969, Manouchehr Ganji, rapporteur khusus yang ditunjuk oleh Komisi Hak Asasi PBB untuk mengkaji hubungan antara hak asasi ma-

nusia dan proses pembangunan, menyiapkan suatu studi mengenai masalah realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kaitannya dengan masalah-masalah negara sedang berkembang. Laporan Ganji ini mempertimbangkan realisasi hak-hak itu di negara-negara kurang berkembang, Blok Soviet dan negara-negara anggota OECD. Inti laporannya adalah hasil suatu penelitian secara mendalam mengenai kondisi-kondisi ekonomi, demografi dan kesehatan di Dunia Ketiga yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah hak asasi. Bagian penting dari laporan itu adalah kesimpulan dan rekomendasi yang mengaitkan implementasi hak asasi manusia dengan proses pembangunan dan masalah-masalah negara sedang berkembang.¹

Selain itu laporan Ganji juga menghidupkan kembali tuntutan Blok Soviet dan Dunia Ketiga bukan saja terhadap prioritas strategi hak ekonomi dan sosial tetapi juga terhadap prioritas strategi hubungan antara realisasi hak asasi manusia dan tingkat pembangunan suatu negara dan kebutuhan untuk merealisasi hak-hak ekonomi dan sosial lebih dahulu daripada hak-hak sipil dan politik.²

Masalah hak mana yang dianggap sebagai prioritas, apakah hak ekonomi, sosial dan kebudayaan atau hak sipil dan politik, mulai dipersoalkan secara serius pada akhir tahun 1960-an. Masalah ini kiranya bisa dikaji secara lebih dalam dari sudut arti *kewajiban* yang ditentukan oleh masing-masing kovenan internasional itu.

Pasal 2 (2) kovenan hak-hak sipil dan politik menentukan bahwa:

"Masing-masing negara peserta kovenan ini berjanji untuk menghormati dan memberi jaminan kepada semua individu yang berada di dalam wilayah dan yurisdiksinya hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau lainnya yang diperlukan untuk merealisasi hak-hak yang diakui dalam kovenan ini."

Sementara itu dalam ketentuan yang paralel kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam pasal 2-nya juga menekankan bahwa:

"Masing-masing negara peserta kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya ekonomi dan teknik, dengan menggunakan sumber-sumber dayanya yang ada semaksimal mungkin demi semakin tercapainya realisasi secara penuh hak-hak yang diakui dalam kovenan ini, dengan segala cara yang semestinya."

Apa yang dilihat sebagai suatu kewajiban menurut ketentuan yang terakhir ini adalah usaha mencapai realisasi hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini (kovenan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan). Dilihat dari segi ini dan dari

¹Mengenai laporan Ganji lebih lanjut lihat Donnelly, "Recent Trends," hal. 637-638.

²*Ibid.*

hasil realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, dapat dikatakan bahwa hak-hak itu kiranya hanya mampu menciptakan pembangunan secara bertahap. Oleh sebab itu implementasi hak-hak sipil dan politik tidak bergantung pada tingkat pembangunan suatu negara. Implementasi hak-hak serupa kiranya lebih banyak bergantung pada kemauan politik negara itu sendiri. Dilihat dari perspektif ini tuntutan Blok Soviet seperti tersebut di atas sulit dipertahankan.

Salah satu prinsip dasar yang tercantum dalam Resolusi No. 32/130 tahun 1977 adalah bahwa realisasi hak-hak sipil dan politik tanpa hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan adalah tidak mungkin. Sebagai konsekuensinya masalah hak-hak asasi manusia perlu dikaji secara global.¹ Hasil pengkajian ini sebagian besar akan bergantung pada interpretasi masyarakat internasional terhadap ketentuan-ketentuan internasional hak asasi manusia. Kalau interpretasi ini dianggap kontroversial, hal itu akan lebih banyak menghambat daripada mempercepat implementasi hak-hak asasi manusia melalui tindakan internasional.

Dalam perdebatan gagasan untuk mengkaji masalah hak-hak asasi secara global itu dirumuskan sebagai suatu desakan untuk menghindari kemungkinan dibicarakannya situasi hak-hak asasi manusia tertentu di beberapa negara oleh PBB. Dalam hubungan ini delegasi Blok Soviet di PBB menekankan bahwa masalah hak-hak asasi manusia merupakan masalah yang termasuk dalam yurisdiksi domestik suatu negara dan oleh sebab itu masalah hak-hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggaran bukan menjadi urusan PBB. Pandangan serupa itu kiranya bertentangan dengan prinsip yang dianut PBB selama ini, yaitu bahwa tindakan PBB di bidang hak-hak asasi manusia didasarkan pada prinsip kerja sama internasional.

Lagi pula, dimensi pelanggaran hak-hak asasi manusia bersifat internasional dan oleh sebab itu walaupun melibatkan kepentingan dan urusan dalam negeri suatu negara, PBB tetap mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap situasi hak-hak asasi manusia di setiap negara. Sikap menentang terhadap prinsip ini akan berarti menjauhkan PBB dari proses implementasi internasional hak-hak asasi manusia dan membiarkannya terlibat hanya dalam bantuan teknik dan finansial serta mobilisasi opini publik internasional. Kalau polarisasi pandangan mengenai prinsip di atas berkembang sedemikian rupa dan sulit diatasi sehingga menghambat tugas-tugas PBB di bidang hak-hak asasi manusia, maka PBB harus memilih satu dari dua pilihan, yaitu menggantung implementasi hak-hak asasi manusia pada itikad baik negara-negara yang bersangkutan atau melakukan intervensi secara hati-hati.

¹*Ibid.*, hal. 646-647.

Kalau PBB mau mengimplementasikan ketentuan-ketentuan internasional hak-hak asasi manusia secara efektif, maka pilihan intervensi adalah yang terbaik untuknya.

PENUTUP

Masalah hak asasi manusia sejak lama merupakan topik yang selalu diperdebatkan dan tercantum dalam agenda-agenda internasional. Inti perdebatan internasional mengenai masalah itu selain mencari mekanisme untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran terhadapnya juga menanamkan pada masyarakat internasional arti penting penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia baik bagi kehidupan negara maupun hubungan antara negara. Tekad keras untuk mencapai tujuan ini terbukti dengan dibentuknya organisasi PBB pada tahun 1945 dan mencantumkan prinsip penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam Piagamnya sebagai salah satu tujuan utamanya.

Sesuai dengan tujuannya itu, Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menerima Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Walaupun tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, Deklarasi Universal ini diterima sebagai hasil konkrit masyarakat internasional dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di dunia. Lagi pula, selain dianggap sebagai kodifikasi komprehensif hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, Deklarasi Universal itu juga diakui sebagai dasar lahirnya persetujuan-persetujuan internasional hak-hak asasi lainnya. Usaha untuk memajukan hak-hak asasi manusia melalui persetujuan-persetujuan internasional itu terutama harus dilihat bukan saja sebagai bagian dari usaha untuk mengatasi pembagian blok di dunia tetapi juga untuk mencapai demokratisasi hubungan internasional dan menciptakan kondisi-kondisi dalam skala nasional dan internasional sedemikian rupa sehingga bisa menjamin penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan bangsa.

Demokrasi Sebagai Cara Hidup*

Terdapat *kekacauan* mengenai arti demokrasi. Perbedaan-perbedaan mengenai konsep itu bukan semata-mata semantik, melainkan lebih mendalam sifatnya. Bila wakil-wakil Amerika, Inggris dan Perancis berbicara mengenai demokrasi, yang mereka maksud adalah lawan apa yang dipikirkan seorang komunis Soviet atau Cina apabila ia menggunakan istilah yang sama. Pada akhir Perang Dunia II misalnya, ketika Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet menduduki Jerman, salah satu tujuan pokok mereka ialah *demokratisasi Jerman*. Mula-mula keempat negara itu setuju mengenai tujuan itu, tetapi segera menjadi jelas bahwa konsep Soviet sama sekali berbeda dengan pengertian demokrasi Amerika, Inggris dan Perancis.

Negara-negara Barat berpendapat bahwa memasukkan demokrasi ke Jerman berarti pemilihan bebas; pers bebas; kebebasan perkumpulan politik; kebebasan beragama, pikiran dan bicara; persamaan di depan hukum; hak untuk melawan pemerintah; hak untuk memilih pekerjaan; hak untuk membentuk serikat buruh bebas; hak untuk bergerak dengan leluasa dalam negara, pergi ke luar negeri untuk sementara waktu, atau beremigrasi secara permanen; dan secara umum hak setiap orang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mental dan moralnya selengkap mungkin. Di atas segala sesuatu, *kebebasan dari ketakutan* adalah pokok dalam konsep demokrasi Barat. Tiada masyarakat yang bisa disebut demokratis kalau para warga negaranya tidak merasa aman dari campur tangan yang tidak sah dalam urusan mereka oleh instansi-instansi pemerintah. Segi demokrasi ini paling baik dilukiskan sebagai berikut: di suatu negara bebas, ketukan pintu pagi buta berarti bahwa tukang susu tiba; di suatu negara totaliter, ketukan yang

*Diambil dari William Ebenstein, *Today's ISMS: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism* (Englewood Cliffs, 1967), hal. 139-151, oleh Kirdi DIPOYUDO.

sama bisa berarti bahwa polisi rahasia di situ, untuk mengambil seorang dari rumah dan keluarganya dan memenjarakan, mengasingkan atau membunuhnya tanpa proses pengadilan yang wajar.

Konsepsi komunis sebagai demokratisasi Jerman sama sekali berbeda dengan konsepsi Barat. Pertama, bila seorang komunis bicara tentang demokrasi, yang dimaksud bukan pemerintah rakyat, juga bukan pemerintahan oleh rakyat, tetapi seperti dikatakan oleh seorang filsuf Soviet terkemuka, "apakah kebijaksanaan ini atau itu dilaksanakan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan mayoritas besarnya atau demi kepentingan minoritasnya" (G.F. Alexandrov, *The Pattern of Soviet Democracy*, 1948).

Orang-orang komunis menyebutkan pokok-pokok demokrasi -- kebebasan bicara, pers dan perkumpulan, persamaan di depan hukum dan semua hak demokrasi pokok lainnya -- demokrasi *formal*, sebagai lawan demokrasi *nyata* kaum komunis, di mana sarana-sarana produksi adalah milik negara. Dalam konsepsi komunis, kebebasan-kebebasan demokratis yang tradisional mendapat suatu arti baru.

Dari ilustrasi di atas jelas mengalir *ciri-ciri pokok* konsep Barat mengenai demokrasi: empirisme rasional; tekanan atas individu; negara sebagai alat; kesukarelaan; hukum di belakang hukum; tekanan atas sarana-sarana; diskusi dan mufakat dalam hubungan antar manusia; dan persamaan hakiki semua orang.

EMPIRISME RASIONAL

Empirisme rasional mungkin adalah unsur tunggal yang paling penting dalam cara hidup bebas. Ia didasarkan atas kepercayaan akan akal budi dan akan kemampuan akal budi bukan saja untuk menguasai alam fisik tetapi juga hubungan manusia. Kaum dogmatis -- seperti kaum komunis dan fasis -- *tahu* apakah kebenaran itu; bagi kaum komunis konsep kelas adalah kebenaran akhir sedangkan bagi kaum fasis ras dan bangsa merupakan penyimpan kebenaran terakhir. Karena kaum dogmatis begitu yakin bahwa mereka tahu, mereka tidak perlu mengadakan penelitian lebih lanjut; tujuannya ialah memperkuat apa yang telah diketahuinya, dan mereka menuduh barang siapa mempersoalkan pengetahuan mereka melakukan subversi intelektual. Hubungan psikologis dan historis antara dogmatis dalam filsafat dan otoriterisme dalam politik adalah jelas; kepastian mutlak mengenai pengetahuan membawa ke entusiasme fanatik dalam perasaan, yang pada gilirannya membawa ke penindasan intoleran dalam pemerintahan.

Sebaliknya empirisme, yang untuk pertama kalinya dikembangkan sepenuhnya oleh John Locke (1632-1704) didasarkan atas gagasan bahwa

seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman. Dalam konsepsi ini, kebenaran adalah tentatif, berubah-ubah, dan tunduk pada pengecekan dan verifikasi yang terus-menerus.

Karena sejarah ilmu fisika maupun gagasan sosial penuh kebenaran yang kemudian ternyata seluruhnya atau sebagian tidak benar, kaum empiris rasional tidak mau percaya, seperti kaum dogmatis percaya, bahwa umat manusia telah sampai atau akan pernah sampai pada jawaban-jawaban final. Salah satu di antara teka-teki yang paling paradoksal mengenai perluasan progresif pengetahuan ialah bahwa dengan meningkatnya pengertian dan pengetahuan kita mengenai suatu masalah atau bidang tertentu kesadaran akan ketidaktahuan kita meningkat lebih cepat. Banyak masalah yang dipecahkan dalam ilmu fisika maupun sosial menciptakan lebih banyak masalah baru daripada yang ada sebelumnya.

Diperlukan banyak pengetahuan dan penelitian untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Orang yang untuk pertama kalinya sadar akan ketidaktahuannya kiranya adalah, dalam evolusi gagasan manusia, ilmuwan yang pertama; karena sadar akan *apa* yang *tidak* diketahuinya, dia mulai berusaha mencari suatu jawaban. Tanpa "pemecahan" Newton terhadap masalah berat, tidak akan ada dunia baru fenomenon fisik yang dibuka oleh Einstein. Tanpa "pemecahan" masalah pemerintahan oleh metode demokratis di dunia modern, tidak akan ada Tockeville yang menemukan dalam *Democracy in America*-nya (1835) dunia baru masalah-masalah politik yang diciptakan oleh pemecahan demokratis.

Dengan demikian kaum empiris rasional menganggap kebenaran, dalam studi alam maupun manusia, sebagai suatu proses tanpa akhir dan memandang pengetahuan kebenaran kini tidak lebih daripada suatu *probabilitas*, yang harus diubah kalau diketemukan fakta-fakta baru. Bertrand Russell menulis dalam *Philosophy and Politics*-nya bahwa orang liberal sejati tidak berkata "Ini benar" tetapi "Saya condong untuk mengira bahwa dalam keadaan sekarang ini pendapat ini kiranya pendapat yang paling baik."

Ilmu dan demokrasi juga sama-sama *menekankan prosedur, bagaimana* (bukan apa) jawaban-jawaban akan muncul sebagai hasil usaha mencari pengetahuan yang benar. Pembetulan pokok kebebasan menyatakan pendapat dalam ilmu maupun demokrasi adalah lebih luas daripada semata-mata kepuasan orang-orang akan oto-ekspresi dan oto-realisasi, betapapun kriteria itu sendiri dapat dibela. Dalam ilmu, seluruh komunitas ilmiah bergantung pada, dan merasa berhak, atas pengumpulan dan komunikasi bebas semua data dan gagasan yang mungkin. Demikianpun komunitas politik demokrasi untuk eksistensinya bergantung pada kebebasan ekspresi sebanyak mungkin fakta dan pendapat sebelum keputusan diambil.

Secara ideal suatu badan legislatif dalam suatu demokrasi bertindak sebagai seorang hakim yang menjatuhkan putusannya setelah mendengar semua pihak yang mengajukan argumen-argumen yang bisa material atau imaterial, penting atau tidak penting. Kenyataannya badan legislatif yang paling tua -- parlemen Inggris -- mulai dan berfungsi selama abad-abad pertama eksistensinya sebagai suatu mahkamah agung; dan bahkan sekarang majelis tinggi parlemen -- House of Lords -- berfungsi sebagai mahkamah agung Inggris. Sampai sekarang semua legislatur demokratis mengikuti prosedur Inggris yang semula berkembang dalam kerangka kegiatan kehakiman.

Yang paling banyak membedakan suatu legislatur demokratis dari suatu legislatur totaliter dengan demikian bukanlah produk final, undang-undang apa dibuat dalam masing-masing lembaga, tetapi *prosedur* mana dianutnya. Terutama prosedur demokratis menuntut, sebagaimana prosedur kehakiman dan ilmiah, agar *semua pihak sengketa didengar*. Dari tuntutan prosedural dasar ini mengalir *kebebasan-kebebasan demokratis pokok*: kebebasan bicara, publikasi, berkumpul dan perkumpulan. Sebaliknya prosedur "parlementer" totaliter hanya membiarkan satu sisi, "garis pantai," untuk disampaikan. Kebenarannya telah di situ, sebelum debat atau diskusi apa pun -- *kalau* diadakan debat atau diskusi, karena sorak-sorai dan tepuk tangan sering mengambil tempatnya.

Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa empirisme rasional dan demokrasi berkembang secara simultan di Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Di Inggris misalnya John Locke, pendiri empirisme, masih merupakan eksponen liberalisme politik yang paling meyakinkan. Di Amerika Serikat empirisme merupakan mazhab pemikiran yang dominan dan mencapai puncaknya pada John Dewey (1859-1952), yang penerapan empirisme rasionalnya pada filsafat dan politik merupakan sumbangan pada warisan liberal Amerika yang menetap.

TEKANAN ATAS INDIVIDU

Tekanan atas individu secara tajam memisahkan demokrasi dari totaliterisme baik fasis maupun komunis. Di mata kaum demokrat, tiada lembaga sosial atau politik, entah suatu kelompok pramuka lokal, sebuah daerah partai, atau negara bagian yang mempunyai maksudnya sendiri selain *melayani dan membantu individu dalam menghayati hidup yang lebih penuh*.

Dalam doktrin totaliter, negara adalah majikan, individu pelayan. Hegel, bapak intelektual fasisme maupun komunisme, mengatakan dalam *Filsafat Hukum*-nya (1821) bahwa individu menemukan kebebasannya dalam mati un-

tuk negara. Hanya kalau individu mati untuk negara ia kehilangan bekas terakhir keanehan dan keunikan pribadi dan secara lengkap menjadi anggota negara.

Sebaliknya John Locke melihat esensi manusia yang tidak bisa dihancurkan dalam melawan negara, bukan dalam mematuhinya secara buta. Asas-asas liberal hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan dengan demikian merupakan lawan konsep otoriter kewarganegaraan sebagai kewajiban, disiplin, dan kematian untuk negara.

Thomas Jefferson, salah satu pendukung personalisme yang paling besar jamannya, mengatakan dalam sebuah surat kepada Kolonel William Stephen Smith, tertanggal 13 Nopember 1787, bahwa "pohon kebebasan harus disegarkan dari waktu ke waktu dengan darah patriot dan tiran." Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat juga menyatakan bahwa hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan adalah di antara hak-hak manusia yang tidak dapat dipindahkan dan bahwa "apabila suatu bentuk pemerintahan menjadi penghancur tujuan-tujuan itu, adalah hak rakyat untuk mengganti atau menghapusnya, dan untuk membentuk pemerintah baru dan meletakkan dasarnya atas asas-asas semacam itu, dan mengorganisasi kekuasaannya dalam bentuk yang kepada mereka kemungkinan sangat besar akan tampak menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka."

Akar-akar historis personalisme adalah tiga: *pertama*, konsep Yâhudi mengenai Tuhan membawa ke gagasan bahwa semua orang, sebagai anak-anak Tuhan, adalah saudara satu sama lain. *Kedua*, ajaran Kristen bahwa jiwa manusia tidak dapat dihancurkan mempertahankan bahwa ketidaksetaraan sosial, ekonomi dan politik mana pun mungkin ada, semua orang mempunyai suatu persamaan dan keunikan spiritual yang tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan duniawi. *Ketiga*, dalam pandangan Stoâ, satu-satunya asas tindakan yang memerintah segala sesuatu ialah *satu dengan dirinya sendiri*, mengenal diri sendiri, dan bertindak selaras dengan asas-asas dan tujuan-tujuan rasionalnya. Diri sejati manusia, menurut kaum Stoa, bukanlah daging atau tulang-tulangnya, tetapi daya yang menggunakannya, *akal budinya*, bagian manusia yang lebih dari lain-lainnya menjadi cirinya sebagai manusia.

Sudah barang tentu personalisme ini tidak pernah diterima sepenuhnya, dan kekuatan-kekuatan kontra totaliterisme selalu mengancamnya. Khususnya dewasa ini ancaman perang bom atom dan hidrogen yang bisa menghancurkan segala sesuatu membawa ke diperkuatnya sikap-sikap anti-individualis dan penekanan gagasan "marilah merapatkan barisan" dan bukan "biar setiap orang memutuskan sendiri apa yang baik dan buruk dan bertindak sesuai dengan itu."

TEORI NEGARA SEBAGAI ALAT

Teori tentang negara sebagai alat melihat negara sebagai suatu mekanisme yang harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Baik Plato maupun Aristoteles, pendiri teori politik Barat, memikirkan negara sebagai suatu entitas organis, yang mempunyai hidup dan tujuannya sendiri, yang lebih tinggi daripada tujuan individu. Plato dan Aristoteles memikirkan negara sebagai *harta moral tertinggi*, sumber nilai-nilai moral dan kekayaan spiritual individu.

Dari sudut pandangan agama Yahudi-Kristen teori instrumentalis negara mengatakan bahwa nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia berkaitan dengan Tuhan dan bahwa tiada hukum duniawi yang bisa menghapus hukum Tuhan. *Fungsi negara ialah memelihara perdamaian dan ketertiban, agar orang-orang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi.* Dari sudut pandangan rasional-humanis teori instrumentalis negara mengukuhkan bahwa kemampuan individu untuk menggunakan akal budinya guna menemukan apa yang baik dan buruk adalah ujian terakhir kekuasaan politik dan bahwa oleh sebab itu *negara tidak dapat mengubah jahat menjadi baik* atau salah menjadi benar semata-mata karena memiliki sarana-sarana paksaan fisik.

Doktrin liberal menekankan masyarakat jauh lebih banyak daripada negara; dalam doktrin liberal yang klasik -- dan sebagian besar kini -- *masyarakat dianggap swasembada pada dasarnya, dan negara hanya harus turun tangan bila usaha-usaha sukarela masyarakat tidak mencukupi.*

Dengan demikian teori instrumentalitas negara menurunkan negara ke suatu kedudukan *subsidiar*. Selama orang-orang bisa hidup tanpa negara, prasangka liberal adalah terhadap negara, bahkan kalau negara bisa melakukan hal yang sama secara sedikit lebih baik.

Dalam negara totaliter, asumsinya selalu menguntungkan negara, karena negara dianggap maha tahu dan maha kuasa. Dengan demikian negara bukan saja menguasai dan mengorganisasi bidang-bidang sensitif ekonomi, pendidikan dan agama, tetapi bahkan pemain catur dan pelancong Minggu sore, karena negara tidak ingin membiarkan kegiatan mana pun kepada keputusan bebas warga negaranya.

KESUKARELAAN

Sebaliknya teori demokratis melihat dalam asas *kesukarelaan* (voluntarism) *darah hidup masyarakat itu sendiri.* Persekutuan (fellowship) dapat paling mendalam dialami dalam kelompok-kelompok sukarela yang kecil. Kelompok-kelompok serupa itu untuk pertama kalinya dibentuk di Inggris

abad ke-17 atas dasar keagamaan, dan sampai sekarang di dunia berbahasa Inggris terdapat ribuan dan ribuan sekte keagamaan yang kecil ukurannya dan sama sekali sukarela sifatnya.

Kemudian asas perkumpulan sukarela diterapkan di bidang politik (partai-partai), pendidikan (sekolah swasta) dan ekonomi (serikat buruh dan perhimpunan majikan). Dalam amal, Palang Merah dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa masih kuatlah maksud untuk mempertahankan kegiatan sukarela. Bahkan di Inggris, yang mempunyai program-program kesehatan dan jaminan sosial nasional yang mencakup setiap orang dari buaian sampai liang lahat, ditekankan kembali arti organisasi sukarela dalam kesejahteraan sosial, yang melengkapi program pemerintah.

HUKUM DI BELAKANG HUKUM

Konsep *hukum di belakang hukum* secara langsung mengalir dari pandangan *federal* mengenai negara dan masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat dipikirkan sebagai suatu kumpulan bermacam-macam perhimpunan sukarela, dan negara itu sendiri dilihat sebagai suatu badan yang pada hakikatnya sukarela karena kekuasaannya berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah. Bilamana kekuasaan diorganisasi atas dasar federal, harus ada *hukum yang lebih tinggi* yang membatasi hubungan bagian-bagian antara mereka sendiri dan antara masing-masing bagian dan keseluruhan.

Dengan demikian demokrasi selalu menganut gagasan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat, antara pemerintah dan individu, akhirnya dibatasi oleh suatu *hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara*. Kenyataannya gagasan demokrasi di Inggris dan Amerika Serikat menganggap bahwa *hukum bukan produk negara tetapi mendahuluinya*. Hak atas hidup, kebebasan, milik dan pencarian kebahagiaan bukan hadiah negara kepada individu, melainkan mendahului negara. Fungsi negara sehubungan dengan hak dasar manusia ialah *melindungi dan membatasi hak-hak serupa itu*, bukan menciptakannya.

Khususnya di Amerika Serikat konsep hukum di belakang hukum tidak pernah ditantang sebagai landasan gagasan dan pengalaman politik Amerika. Deklarasi Kemerdekaan secara spesifik mengakuinya, dan Konstitusi juga mengakui bahwa tiada badan legislatif yang bisa membuat undang-undang tanpa proses yang diwajibkan atau undang-undang yang melanggar asas-asas akal budi yang pokok. Sudah barang tentu eksistensi Amerika Serikat adalah berkat penegasan bahwa di atas hukum yang berlaku waktu itu, yaitu hukum Inggris imperial, ada hukum yang lebih tinggi yang kepadanya kaum kolonis revolusioner menyatakan kesetiaannya.

Lawan-lawan pemerintah demokratis menuduh bahwa konsep hukum yang lebih tinggi ini, yang membuat pemerintah bergantung pada persetujuan rakyat yang diperintah, membuka pintu untuk pemberontakan dan anarki. Dalam *Two Treaties of Government* (1690)-nya, John Locke menjawab tuduhan ini dengan tiga argumen tangkisan. *Pertama*, John Locke mengakui bahwa teori demokratis pemerintahan menerima kemungkinan pemberontakan, tetapi menyangkal bahwa ia lebih banyak melakukannya daripada lain-lain teori mana pun. Bila rakyat dibuat menderita terlalu berat, mereka akan memberontak di bawah bentuk pemerintahan mana pun; sekali pun para gubernur "suci dan ilahi, yang berasal atau dikuasakan dari surga, anggaplah mereka menurut kesenangan anda, hal yang sama akan terjadi." *Kedua*, Locke mengatakan bahwa orang-orang tidak memberontak "pada setiap salah urus kecil dalam urusan negara," atau "untuk perkara-perkara yang kecil dan sementara," seperti ditegaskan oleh Deklarasi Kemerdekaan. *Ketiga*, dan di sini Locke bergerak dari pembelaan ke ofensif, pemerintahan dengan persetujuan yang digabungkan dengan hak untuk memberontak adalah "pagar yang paling baik terhadap pemberontakan."

Locke hanya bisa menduga pada tahun 1690 apakah argumen-argumennya akan dibenarkan oleh pengalaman, karena pada waktu itu demokrasi masih merupakan suatu hal hari depan. Namun pengalaman membuktikan bahwa dia melihat dengan tajam. Sistem pemerintahan Inggris dan Amerika, yang didasarkan atas pengakuan Locke-Jefferson atas hak rakyat untuk memberontak melawan penindasan, ternyata merupakan *sistem politik yang paling stabil dan berhasil* yang pernah dilihat di dunia, dan yang sama dapat dikatakan mengenai negeri-negeri (lebih kecil ukurannya tetapi sama besar dalam kemuliaan kebebasan) seperti Belanda, Swiss dan negara-negara Skandinavia. Sebaliknya, di mana hukum yang lebih tinggi itu ditolak atas nama hukum dan tertib, hasil politiknya ialah pembersihan berdarah, komplotan, makar dan kontra-makar, dan pergantian dengan kekerasan dari satu sikap ekstrim ke sikap ekstrim lain -- khususnya sejarah politik diktator fasis dan komunis.

TEKANAN ATAS SARANA

Tekanan atas sarana-sarana dalam kehidupan demokrasi didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan-tujuan tidak mempunyai eksistensi terpisah dari sarana-sarana tetapi secara terus-menerus dibentuk olehnya. Kaum totaliter menarik suatu perbedaan tajam antara tujuan dan sarana. Dalam cara dogmatis pemikirannya mereka mutlak pasti mengenai apakah tujuan-tujuan itu, dan dalam kepastian itu mereka tidak banyak memperhatikan sifat sarana. Jadi, golongan komunis percaya akan persaudaraan universal dan kerja sama sebagai tujuan mereka yang diakui secara resmi, namun mereka tidak menyadari bahwa sarana-sarana yang digunakan untuk mewujudkan komunisme

-- polisi rahasia, kamp-kamp kerja paksa "koreksional," kontrol pikiran, penyalahan, dan penindasan pendapat yang berbeda -- meningkatkan kebenaran dan penderitaan, dan bukan menguranginya.

Salah satu kesulitan dalam memisahkan sarana dan tujuan ialah kenyataan bahwa *dalam kebanyakan situasi praktis sarana adalah sekaligus tujuan*. Jadi, pendidikan bagi sementara adalah tujuan; untuk lain-lain orang sarana untuk suatu tujuan -- suatu gelar misalnya. Namun gelar itu sendiri bisa hanya merupakan suatu sarana untuk tujuan hidup yang lebih bahagia dan penuh, atau suatu pekerjaan yang lebih baik. Lagi, suatu pekerjaan yang lebih baik tidak mesti merupakan suatu tujuan pada dirinya sendiri; ia kiranya adalah sarana untuk suatu tujuan yang lebih tinggi, misalnya mengungkapkan suatu perasaan keahlian atau melayani masyarakat.

Kedudukan sentral sarana dalam masyarakat bebas tertanam kuat dalam pengalaman hidup mereka. Magna Charta, habeas corpus, dan peradilan juri, untuk hanya menyebutkan beberapa akar kebebasan di dunia berbahasa Inggris, mula-mula adalah *alat-alat prosedural, sarana-sarana*; dan sejarah kebebasan dapat dibatasi dengan baik sebagai sejarah prosedur. Dalam majelis-majelis perwakilan juga bukanlah produk legislatif yang membedakan suatu lembaga demokratis dari suatu lembaga non-demokratis, tetapi perbedaan prosedur. Dalam hal yang satu prosedur ditujukan pada *jaminan hak minoritas yang paling penuh dan wajar untuk didengar*; dalam hal yang lain, prosedur ditujukan untuk membungkam minoritas dan memancing volume sorak yang sekeras mungkin untuk si diktator.

Dewasa ini bahaya dalam masyarakat demokratis terletak dalam kemungkinan memudarnya kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan mengenai sarana-sarana adalah pokok perbedaan antara demokrasi dan totaliterisme. Dalam melawan suatu sistem totaliter seperti fasisme atau komunisme terdapat suatu kecenderungan alamiah untuk *meniru sarana-sarana mereka*, dan oleh sebab tendensinya alamiah, harus dilakukan usaha-usaha khusus untuk berjaga-jaga terhadapnya. Dalam membela demokrasi sementara orang bersedia menggunakan sarana-sarana yang akan merusak hal yang mereka bela itu sendiri.

MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Musyawarah dan mufakat adalah sarana-sarana yang digunakan demokrasi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan dan kepentingan. Menurut pandangan demokratis, karena tiada orang yang memiliki kebenaran mutlak, kedua pihak suatu argumen bisa memberikan sumbangan menuju jawaban yang sebaik mungkin dan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban itu ialah menggalang semua bukti yang tersedia.

Pemilih merdeka dalam suatu demokrasi merupakan tipe orang yang tidak bersedia mengikat dirinya tanpa syarat dengan satu partai, atau karena terlalu sedikit tahu (kurang sering) atau terlalu banyak mengenai politik, atau semata-mata karena -- apa pun tingkat informasi politiknya -- ia tidak mengharapkan terlalu banyak dari pemerintah. Dalam suatu negara totaliter tiada pemilih merdeka, hanya pengikut atau musuh cara berpikir yang berkuasa. Arti penting pemilih yang independen dapat dilihat dengan jelas dalam banyak pemilihan. Tahun 1952 Partai Republik memilih Jenderal Eisenhower atas Senator Taft sebagai calon presidennya, terutama karena daya tariknya yang lebih kuat di kalangan pemilih independen. Sebaliknya, kekalahan Goldwater dalam pemilihan presiden tahun 1964 oleh banyak orang dilihat sebagai akibat lemahnya daya tariknya di kalangan pemilih yang independen.

Dalam teori masyarakat demokratis, pemerintah mendapatkan "kekuasaan sah mereka dari persetujuan mereka yang diperintah" (Deklarasi Kemerdekaan Amerika), karena *negara tidak mempunyai alasan eksistensi selain melayani rakyat*. Kalau negara menjadi penindas dan mengabaikan hak-hak rakyat, maka teori demokratis, seperti dikemukakan di atas, bukan saja menjunjung tinggi hak melainkan juga kewajiban untuk memberontak terhadap pemerintah serupa itu.

Hak memberontak ini hanya bisa dituntut di mana metode-metode musyawarah dan mufakat diblokir oleh despotisme tiranik; di mana saluran-saluran diskusi terbuka, seperti dalam suatu negara dan masyarakat demokratis, tiada demokrat yang akan menuntut hak memberontak terhadap negara.

Orang komunis yang sekarang menuntut hak revolusi sebagai suatu priviledi demokratis yang umum sama sekali memalsukan konsep ini untuk maksud-maksudnya sendiri. Dari sudut pandangan demokratis, *orang demokrat mempunyai hak moral dan kewajiban moral, untuk memberontak terhadap sistem totaliter, tetapi orang totaliter tidak mempunyai hak semacam itu terhadap sistem demokratis* (karena saluran-saluran diskusi dan mufakat terbuka).

PERSAMAAN HAKIKI SEMUA ORANG

Persamaan hakiki semua orang adalah suatu pasal doktrin dan policy demokratis yang sering dipahami secara salah. Tiada demokrat yang pernah mengatakan bahwa semua orang identik melainkan bahwa *dalam segi-segi dasar mereka sama*. Keunikan setiap orang itu sendiri menciptakan semacam persamaan yang penting dalam pandangan demokratis. Dari sudut pandangan

keagamaan tradisi Yahudi-Kristen *semua orang sama di depan Tuhan*; tantangan Tuhan terhadap setiap orang adalah sama, biarpun tanggapan orang-orang terhadapnya sangat berbeda-beda. Dari sudut pandangan rasionalis-humanis, semua orang sama-sama mempunyai, di atas perbedaan ras, kelamin, agama, kebangsaan, dan kelas, satu corak bersama; *kemampuan bernalar*. Dalam arti ini semua orang adalah warga dunia dan bukan warga suatu kelompok khusus, dan persamaan hakiki mereka berasal dari apa yang mereka miliki bersama, bukan dari apa yang memisahkan mereka.

Deklarasi Kemerdekaan menegaskan sejelas-jelasnya bahwa semua orang diciptakan sama, dalam arti bahwa mereka mempunyai hak-hak tak terpisahkan tertentu, seperti hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan. Persamaan yang diterima seorang pada kelahirannya, menurut teori demokratis, pada dasarnya bukan suatu hadiah tetapi suatu pinjaman, seolah-olah, suatu *peluang*, suatu *tantangan*. Kalimat Jefferson "pencarian kebahagiaan" secara mengagumkan menyatakan gagasan bahwa manusia tidak mempunyai hak atas kebahagiaan, melainkan hanya mempunyai hak untuk mengusahakan kebahagiaan, tanpa rintangan-rintangan yang tidak masuk akal.

Akan tetapi persamaan tidak berarti, seperti dituduhkan oleh Plato, "memberikan semacam persamaan kepada orang-orang yang sama maupun tidak sama." Lawannya adalah benar, dari sudut cita-cita demokrasi paling tidak. Dalam praktek tidaklah mudah mengetahui kapan orang-orang yang sama masih sama dan kapan mereka menjadi tidak sama. Jadi, untuk mengambil suatu ilustrasi, tafsir persamaan demokrasi yang paling umum ialah "persamaan kesempatan." Suatu kesulitan berat langsung muncul. Kalau semua orang dibekali bakat dan kemampuan yang sama, dan lahir dalam rumah yang sama, dan menerima pendidikan yang sama, memberi semua suatu persamaan kesempatan akan adil. Namun orang-orang berbeda dalam bakat bawaan dan bahkan lebih banyak dalam latar belakang dan pendidikan.

Tindakan legislatif tidak bisa menyamakan IQ penduduk, dan akan selalu ada perbedaan-perbedaan kemampuan, semangat, motivasi, tetapi *undang-undang dapat membuat persamaan kesempatan lebih nyata dengan berusaha menyamakan kondisi sebelum balapan dimulai*: pajak warisan yang dinaikkan mengurangi dampak kekayaan warisan, pajak pendapatan progresif lebih menguntungkan kelompok-kelompok pendapatan rendah, dan pendidikan cuma-cuma (dari TK sampai universitas) lebih menguntungkan yang miskin daripada yang kaya. Dengan perkataan lain, persamaan kesempatan, kalau membiarkan kemampuan saja beroperasi, cepat menciptakan dan mengabadikan ketidaksamaan. *Kebutuhan juga harus dipertimbangkan*; kebutuhan menambahkan asas efisiensi pada asas kebahagiaan.

